

PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN

Unit Pemilik Risiko : Biro Hukum
Tahun : 2024
Triwulan : II

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator (Keluarkan)	Target Waktu	Realisasi Waktu TW II	Hasil Pemantauan TW II	Hambatan/ Kendala	
1	1. Penyusunan peraturan perundangan undang-undangan tidak sesuai target	2	3	4	5	6	7	8	10	11
1	Mengurangi frekuensi terjadinya peraturan perundangan undang-undangan yang tidak sesuai target	1. Pelaksanaan monitoring penyusunan peraturan perundangan undang-undangan setiap triwulan 2. Sosialisasi Permen 15 Tahun 2023 tentang pembentukan dan evaluasi produk hukum	Kepala Bagian Peraturan Perundangan undang-undangan setiap triwulan Kepatuhan Intern	1. Laporan Pelaksanaan Monitoring Penyusunan Peraturan Perundangan undang-undangan setiap triwulan 2. Laporan Sosialisasi	1. Bulan April, Juli, Oktober, Desember 2024 (B06) 2. Selasa (Triwulanan)	1. 25 - 26 Juli 2024 2. -	1. Akan dilaksanakan Rapat Monitoring B06 pada tanggal 25-26 Juli 2024. 2. -	-	-	
2	ditemukannya asli produk hukum	Mengurangi frekuensi terjadinya perangkingan dokumentasi produk hukum	Kepala Bagian Peraturan Perundangan undang-undangan dan Kepatuhan Intern	1. Dokumentasi ruangan penyimpanan dokumen asli produk hukum 2. SOP penyimpanan dokumen asli produk hukum	Bulan Oktober 2024	1. Bulan Februari 2024 2. Bulan Mei 2024	1. Sudah Tersedia Ruangan Penyimpanan Produk Hukum pada Ruang Dokumentasi JDHI di Biro Hukum beserta Fasilitas, dan Ruang Penyimpanan di Gedung Arsip Kintaka. 2. Telah ada Keputusan Pt. Kepala Biro Hukum Nomor: 01/SOP/Sh/2024 tentang Prosedur Penyimpanan Dokumen Peraturan Perundangan-undangan dan Prosedur Penitigaman Dokumen Peraturan Perundangan-undangan Asli pada tanggal 10 Juli 2024.	1. Sudah dilaksanakan Rapat Monitoring Penyimpanan Produk Hukum bersama Fasilitas dan Ruang Penyimpanan di Gedung Arsip Kintaka. 2. Telah ada Keputusan Pt. Kepala Biro Hukum Nomor: 01/SOP/Sh/2024 tentang Prosedur Penyimpanan Dokumen Peraturan Perundangan-undangan dan Prosedur Penitigaman Dokumen Peraturan Perundangan-undangan Asli pada tanggal 10 Juli 2024.	1. Sudah dilaksanakan Rapat Monitoring Penyimpanan Produk Hukum bersama Fasilitas dan Ruang Penyimpanan di Gedung Arsip Kintaka. 2. Telah ada Keputusan Pt. Kepala Biro Hukum Nomor: 01/SOP/Sh/2024 tentang Prosedur Penyimpanan Dokumen Peraturan Perundangan-undangan dan Prosedur Penitigaman Dokumen Peraturan Perundangan-undangan Asli pada tanggal 10 Juli 2024.	
3	Optimalnya pengurangan sengketa frekuensi terjadinya keterbukaan informasi publik	Menyediakan forum konsultasi dan koordinasi perangkingan informasi publik	Kepala Bagian Advokasi Hukum	Laporan Forum Konsultasi	Bulan Desember 2024	1. 7-8 Mei 2024	-	-	-	
4	Optimalnya pengurangan manajemen risiko Sekretariat Jenderal	Menyediakan forum konsultasi dan koordinasi perangkingan informasi publik	Kepala Bagian Advokasi Hukum	1. Surat Himbauan Untuk Mengikuti Diklat Manajemen Risiko 2. Laporan Pelaksanaan Penilaian Mandiri	1. Bulan Maret 2024 2. Bulan Desember 2024	1. 5-6 Februari 2024 2. Dalam Proses	I. a. Sudah terdapat Surat Himbauan Untuk Mengikuti Diklat Manajemen Risiko Nomor: SM 0304-Sh/2/12 tentang Penyampaikan Informasi dan Permohonan Calon Peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepatuhan Intern kepada Seluruh Unit Kerja di Sekretariat Jenderal. b. Surat Pernagelilan Pelatihan Manajemen Risiko pegawai di Sekretariat Jenderal. 2. Masih menunggu Perubahan Pedoman Penilaian Mandiri Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.	I. a. Sudah terdapat Surat Himbauan Untuk Mengikuti Diklat Manajemen Risiko Nomor: SM 0304-Sh/2/12 tentang Penyampaikan Informasi dan Permohonan Calon Peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepatuhan Intern kepada Seluruh Unit Kerja di Sekretariat Jenderal. b. Surat Pernagelilan Pelatihan Manajemen Risiko pegawai di Sekretariat Jenderal. 2. Masih menunggu Perubahan Pedoman Penilaian Mandiri Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.	I. a. Sudah terdapat Surat Himbauan Untuk Mengikuti Diklat Manajemen Risiko Nomor: SM 0304-Sh/2/12 tentang Penyampaikan Informasi dan Permohonan Calon Peserta Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepatuhan Intern kepada Seluruh Unit Kerja di Sekretariat Jenderal. b. Surat Pernagelilan Pelatihan Manajemen Risiko pegawai di Sekretariat Jenderal. 2. Masih menunggu Perubahan Pedoman Penilaian Mandiri Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko.	
5	Optimalitas penerapan manajemen risiko di Sekretariat Jenderal	1. Pelaksanaan peningkatan kompetensi manajemen risiko di Sekretariat Jenderal 2. Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Efektivitas Penerapan MR oleh undang-undangan dan Kepatuhan Intern	Kepala Bagian Peraturan Perundangan undang-undangan oleh undang-undangan dan Kepatuhan Intern	1. Surat Himbauan Untuk Mengikuti Diklat Manajemen Risiko 2. Laporan Pelaksanaan Penilaian Mandiri	1. Bulan Maret 2024 2. Bulan Desember 2024	1. 5-6 Februari 2024 2. Dalam Proses	Telah terdapat rencana pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM dalam Penyusunan Perjanjian Peneritian Badan Usaha pada Bulan September 2024.	Telah terdapat rencana pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM dalam Penyusunan Perjanjian Peneritian Badan Usaha pada Bulan September 2024.	Telah terdapat rencana pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM dalam Penyusunan Perjanjian Peneritian Badan Usaha pada Bulan September 2024.	
6	Optimalnya pengurangan frekuensi terjadinya kerjasama pemerintah Badan Usaha	Menyediakan sumber daya manusia dalam penyusunan perjanjian kerjasama pemerintah Badan Usaha	Kepala Bagian Advokasi Hukum	Laporan Potaksanaan Kegiatan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan perjanjian kerjasama Pemerintah Badan Usaha	Bulan Desember 2024	Dalam Proses	Sudah dilaksanakan Rapat Monitoring Penyusunan Perjanjian Peneritian Badan Usaha pada Bulan September 2024.	Sudah dilaksanakan Rapat Monitoring Penyusunan Perjanjian Peneritian Badan Usaha pada Bulan September 2024.	Sudah dilaksanakan Rapat Monitoring Penyusunan Perjanjian Peneritian Badan Usaha pada Bulan September 2024.	
7	Perintangan hukum tidak tepat waktu	Penyebarluasan SOP perintangan hukum	Kepala Bagian Advokasi Hukum	Laporan Penyebarluasan SOP	Bulan Desember 2024	Dalam Proses	Sudah dilaksanakan Rapat Monitoring Penyusunan Perjanjian Peneritian Badan Usaha pada Bulan September 2024.	Sudah dilaksanakan Rapat Monitoring Penyusunan Perjanjian Peneritian Badan Usaha pada Bulan September 2024.	Sudah dilaksanakan Rapat Monitoring Penyusunan Perjanjian Peneritian Badan Usaha pada Bulan September 2024.	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu TW II	Hasil Pemanfaatan TW II	Hambatan/ Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
7	Keterlambatan kinerja pegawai tiap triwulan	Mengurangi penilaian frekuensi terjadinya	Melakukan pendampingan pengisian SKP ke seluruh pegawai per triwulan	Kepala Subbagian Tata Usaha	1. Laporan SKP Pegawai	1. Bulan April, Juli, Oktober, Desember 2024 [triwulanan]	1. Sudah dilakukan pendampingan untuk pengisian SKP pada bulan April 2024.	1. Pengisian SKP Triwulan II belum dapat dilakukan, sehubungan dengan adanya peretasan pada insiden FDNS 2, yang mana aplikasi SKP (e-kirje) tidak dapat diakses sama sekali.	
8	Tidak sesuaiya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan	Mengurangi frekuensi terjadinya	1. Pengasistensian PPABP kepada PPABP Mahir 2. Kertas Kendali Pencatatan Gaji Pegawai	Kepala Subbagian Tata Usaha	1. Laporan assistensi 2. Laporan Gaji	Bulan Desember 2024	1. Sudah terdapat jadwal pendampingan SKP Triwulan II pada bulan Juli 2024.	1. Pengisian pendampingan peraturan gaji dan tunjangan yang benaku serta teknis pembayaran gaji melalui aplikasi gaji web. 2. Selesai	
9	Deviasi Halaman yang terlalu jauh	III DIPA Mengurangi frekuensi terjadinya	1. Asistensi PPK dan Pegawai yang terkait dengan administrasi keuangan 2. Melakukan koordinasi dan pembinaan melalui rapat internal untuk merepons perubahan jadwal kegiatan dan besaran	Kepala Subbagian Tata Usaha	1. Laporan assistensi 2. Laporan Rapat	Bulan Desember 2024	1. Dalam Proses 2. Januari 2024	1. Telah dilakukan koordinasi dengan KPN Jakarta V melalui konsultasi terkait peraturan gaji dan tunjangan yang benaku serta teknis pembayaran gaji melalui aplikasi gaji web. 2. Selesai	
10	Terimbangnya laporan money bulanan unit kerja	pelaporan kinerja frekuensi terjadinya	1. Bank Data Kinerja Unker (OneDrive) 2. Penyelegaraan Rapat Internal Bulanan Unit Kerja	Kepala Internal Subbagian Tata Usaha	1. OneDrive Data Kinerja 2. Notulen Rapat	Bulan Desember 2024	1. Bulan April 2. Bulan Mei dan Juli 2024	1. Selesai. 2. Sudah dilaksanakan rapat koordinasi kesatuan pada bulan Mei dan Juli 2024.	
11	Keterlambatan Dokumen Keberlakuan BMN Kepada	penyampaianan Perencanaan frekuensi terjadinya	1. Asistensi kepada para pegawai Biro Hukum yang menangani penatausahaan BMN 2. Penutakhiran Inventarisasi Satuan Kerja per Tahun	Kepala Subbagian Tata Usaha BMN	1. Laporan Assistensi 2. Berita Acara Inventarisasi BMN Satuan Kerja	Bulan Desember 2024	1. Februari 2024 2.1 Februari 2024 2.2 Mei dan Juli 2024	1. Selesai. 2. telah dilaksanakan rapat internal bulanan pada bulan Mei dan Juli 2024.	



July 2024

[Signature]

Mardi Pantuwiyoto, S.H., M.H.

NIP 0860512003121002

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Biro Hukum
 Tahun : 2024
 Triwulan : II

No	Pernyataan Risiko	Kehadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual	Besaran Risiko	Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi
			Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Penyusunan peraturan perundangan undangan tidak sesuai target	0	1	4	9	1	4	9	0
2	Tidak ditemukannya dokumen asli produk hukum	0	1	4	9	1	4	9	0
3	Belum Optimalnya penanganan sengketa Keterbukaan Informasi Publik	0	2	3	10	2	3	10	0
4	Masih belum optimalnya tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko di Sekretariat Jenderal	0	2	3	10	2	3	10	0
5	Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia pendampingan dalam penyusunan perjanjian kerjasama pemerintah Badan Usaha	0	1	4	9	1	4	9	0
6	Penyusunan pertimbangan hukum tidak tepat waktu	0	1	4	9	1	4	9	0
7	Keterlambatan penilaian kinerja pegawai tiap triwulan	0	1	4	9	1	4	9	0
8	Tidak sesuainya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan	0	1	4	9	1	4	9	0
9	Deviasi Halaman III DIPA yang terlalu jauh	0	1	4	9	1	4	9	0
10	Terlambatnya pelaporan laporan monev kinerja bulanan unit kerja	0	1	4	9	1	4	9	0

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi
			Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Keterlambatan penyampaian Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMN Satuan Kerja	0	1	4	9	1	4	9	0	



Juli 2024

Pit. Kepala Biro Hukum

Mardi Parmonenoto, S.H., M.H.

TINJAUAN ATAS RISIKO BARU ATAU MASALAH YANG BELUM TERIDENTIFIKASI

Unit Pemilik Risiko : Biro Hukum

Tahun : 2024

Triwulan : II

No	Nama Kejadian	Perryataan Risiko	Penyebab Risiko	Skor	Skor Dampak	Besaran Risiko	Respon Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Belum ditemukan risiko baru						9



PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN

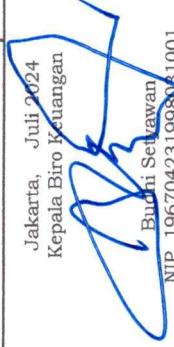
Unit Pemilik Risiko : Biro Keuangan

Tahun : 2024

Periode : Triwulan II

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan		Hambatan/ Kendala
								9	10	
1	TLRHP belum terlaporkan (<i>upload ke SIPTL</i>).	Mengurangi kemungkinan	1. Penyampaian data progres TLRHP secara per bulan dan per triwulan. Kepada Unit Organisasi dan Pengendalian Intern 2. Pelaksanaan FGD pembahasan TLRHP dwibulanan/triwulan 3. Pengembangan Sistem Pemantauan TLRHP Internal yang dapat digunakan sampai level Satker (Simonti)	Kepala Bagian Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Intern	1. Surat/ ND Kepala Biro (trivulanan) diterbitkan menjelang Trivulanan (rapat) 2. Dokumentasi dan notulensi rapat 3. Dokumentasi pengembangan sistem	1. Triwulan I (Data pemantauan) 2. Triwulan II (rapat) 3. Desember 2024 (sistem)	1. Target waktu dimingguan disediakan di Laporan Trivulanan dan Bulan April	1.a Surat Bapak Sekretaris Jenderal Nomor PW.0202-SI/363/Tanggal 30 April 2024. Hal percepatan TLRHP BPK RI di Kementerian PUPR Triwulan II Tahun 2024. 1.b. Surat Sekretaris Jenderal Nomor PW/0202/Si/389 Hal Monitoring TLRHP Bulan April 2024 tanggal 7 Mei 2024. 1.c. Surat Penyampaian TLRHP atas Kensep Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian PUPR Tahun 2023, Tahap 1 s.d Triwulan II (Bulan Juni)	1.a. Periodes perubahan inovasi pengendalian Penyampaian data progres TLRHP secara dwitungguan kepada Unit Organisasi diubah menjadi triwulan. Tindak Lanjut Rekomendasi Basit Pemeriksaan (TLRHP) secara dwitungguan kurang efisien mengingat siklus penelitian pada SIPTL dilakukan secara semestera sehingga pelaporan money dialakukan secara bulanan dan triwulan. 1b. Saldiansa terhadap BPK RI atas TLRHP tidak diterima/kurang lengkap dan penyampaian relatif tersebut bersifat umum untuk tingkat Kementerian sehingga diperlukan analisis untuk tingkat Unit/ Satker. 2. Proses database TLRHP cukup rigid dan beragam serta selalu berantabah disetiap Semester realitne sehingga memerlukan waktu untuk cleansing data sebelum dimigrasi kedalam sistem.	
2	Terdapat catatan MONSAKTI (16Dolist)	Mengurangi kemungkinan	1. Pihakitas Unit dalam pemantauan Catatan MONSAKTI ditulip dalam rangka mitigasi penyelesaian catatan belum H-2 batas waktu tutup buku/rekonsiliasi periode. 2. Pelaksanaan FGD untuk pembahasan permasalahan spesifik dan signifikan 3. Pemandangan Aplikasi HAI D/PBS 4. Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi dan koreksi pelaporan Keuangan Unaudited tingkat UAKPA dan UAPPA-E1	Kepala Bagian Pelaporan Keuangan dan Pengendalian Intern/ Kepala Biro Keuangan	1. Laporan Monitoring catatan MONSAKTI Indeks 3 untuk Penyelesaian catatan Todo List MONSAKTI 3. Bukti tanggapan terhadap pengujian tiket pada Aplikasi HAI D/PBS 4. Laporan Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi dan koreksi pelaporan Keuangan Unaudited tingkat UAKPA dan UAPPA-E1	1. Bulanan H-2 batas Waktu tutup buku, Juni s.d Desember 2024 2. Mulai Juli s.d Desember 2024 3. Semester II	1. H-2 batas waktu tutup buku, Juni s.d Desember 2024 2. Masih dalam proses 3. Masih dalam proses 4. Masih dalam proses	1.a Surat Kepala Biro Keuangan hal Undangan Rapat penyusunan nota persiapan rekonstruksi data capitan output tahun 2023 Kementerian PUPR nomor UMO102 Sk 250 tanggal 5 April 2024 1.b Surat Kepala Biro Keuangan hal undangan pembahasan jurnal koreksi Tahap 1 nomor UMO102 Sk 258 tanggal 17 April 2024 1.c Surat Kepala Biro Keuangan hal undangan pembahasan jurnal koreksi tahap 2 nomor UMO102 Sk 279 tanggal 29 April 2024 2.a Surat Kepala Biro Keuangan hal Undangan Rapat penyusunan nota persiapan rekonstruksi data capitan output tahun 2023 Kementerian PUPR nomor UMO102 Sk 250 tanggal 5 April 2024 2.b Surat Kepala Biro Keuangan hal undangan pembahasan jurnal koreksi Tahap 1 nomor UMO102 Sk 258 tanggal 17 April 2024 2.c Surat Kepala Biro Keuangan hal undangan pembahasan jurnal koreksi tahap 2 nomor UMO102 Sk 279 tanggal 29 April 2024 2.d Surat Kepala Biro Keuangan hal Undangan Focus Group Discussion (FGD) I Bantuan Teknis Pemerataan dan Pelaporan Aset Konsesi Jasa di Kementerian PUPR Undangan Focus Group Discussion (FGD) Bantuan Teknis Pemerataan dan Pelaporan Aset Konsesi Jasa di Kementerian PUPR nomor UMO102-Sk/318 Tanggal 14 Mei 2024 3.a Surat Kepala Biro Keuangan hal Undangan Penyelesaian SP3 nomor UMO102 Sk 294 tanggal 5 Mei 2024 4.a Surat Kepala Biro Keuangan hal Survey dan Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan Penyusunan Sistem Akuntansi dan Koreksi Pelaporan Keuangan Unaudited Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-Eselon I, dan UAPPA nomor PW/201-SK/361 Tanggal 12 Juni 2024	1. Data MONSAKTI terkadang sulit diketahui secara lengkap dan terdapat beberapa informasi yang memang belum tersedia di MONSAKTI, sehingga masih perlu pengolahan manual yang membutuhkan banyak waktu dan sumber daya. 2. Penyelesaian Laporan Tiket dari Satker tidak memiliki batasan waktu untuk penyelesaian tiket tersebut	
3	Laporan realisasi PNBP	Mengurangi kemungkinan	1. Melakukan sosialisasi atas dasar pada Satuan Kerja Kementerian PUPR kurang akurat dan terlambat disampaikan	Kepala Bagian Perpendidikan	1. Surat Tugas dan laporan kerjatannya	Semester I dan II	Semester I Tahun 2024	1. Pelaksanaan sosialisasi dasar hukum PNBP terbaru yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 5 tahun 2024 tentang Bersetara Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP sampai dengan Nol (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian PUPR 2. Pelaksanaan pendampingan penyusunan dasar hukum atas formula tarif dan jenis PNBP yang berupa sewa peralatan konstruksi bidang PUPR Target PNBP	1. Dalam forum diskusi, peserta yang hadir bukan pegawai yang melaksanakan perintiran dan pengurusan sewa alat konstruksi bidang PUPR sehingga informasi terkait permasalahan seperti sewa alat konstruksi masih belum maksimal.	

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator (Ketuaan)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan/ Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Masih tercipta Pejabat Perbendaharaan yang belum/tidak bersertifikat	Mengurangi kemungkinan	1. Pemutakhiran informasi sertifikasi kompetensi pada aplikasi perbendaharaan ESKOPI. 2. Pemutakhiran infografis mengenai sertifikasi kompetensi bagi pejabat perbendaharaan. 3. Melakukan Updating Data Sertifikat Kompetensi Pejabat Perbendaharaan secara berkala untuk disebarkan kepada seluruh Unit Organisasi dan Unker /UP/ /Balai terkait. 4. Coaching clinic (pendampingan) sertifikasi kompetensi bagi Pejabat Perbendaharaan	Kepala Bagian Perbendaharaan	1. Bukti Screenshot penyampaian informasi melalui aplikasi ESKOPI. 2. Pamflet infografis dengan substanti terkini berserta bukti penyebaran pamflet infografis. 3. Surat Kepala Biro Keuangan terkait updating data sertifikat. 4. Surat Pemberitahuan terkait Sertifikat Kompetensi, Undangan Coaching clinic	1. Triwulan IV 2. Triwulan II 3. Semester I 4. Semester	1. Masih dalam proses 2. Triwulan II 3. Semester I 4. Semester I	1. Telah disampaikan informasi mengenai sertifikat kompetensi sudah dilakukan pada aplikasi ESKOPI 2. Telah disusun pemutakhiran infografis mengenai alur sertifikasi kompetensi benda/bara, ppk dan ppjm sebagai bentuk penyebaran informasi kepada pejabat perbendaharaan untuk untuk mendapatkan kompetensi bagi pejabat perbendaharaan. 3. Pendampingan coaching clinic sertifikasi kompetensi pejabat perbendaharaan dan pendaftaran sertifikasi kompetensi pada aplikasi simpasaten, yang dilaksanakan setiap minggu. 4. Penyampaian informasi sertifikat kompetensi pejabat perbendaharaan kepada Unit Organisasi melalui surat Sekretaris Jenderal Kompetensi.	1. Pemutakhiran data melalui aplikasi ESKOPI mengalami kendala pada sejak akhir Juni 2024 dan tidak dapat diakses dikarenakan adanya gangguan pada Pusat Data Nasional. 2. Kurangnya perhatian peserta coaching clinic atas jadwal yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan adanya reminder bagi peserta coaching clinic untuk mengikuti pendampingan sesuai dengan agenda yang ada. 4. -
5	NSP bidang keuangan terlambat disusun dan/ atau terlambat disosialisasikan	Mengurangi kemungkinan	1. Penyusunan time-table rapat berkaia berkas fisik kerpa Skretariat Unor. 3. Sosialisasi atau Moner atas pelaksanaan ketertiban dalam NSP bidang keuangan 4. Penyebarluasan NSP melalui JDIH PUPR atau website Eskopi Biro Keuangan	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran	1. Time-table pelaksanaan rapat 2. Buku pengiran TNDE atau fisik berkas NSP kepada Sekretariat Unor 3. Surat undangan atau surat tugas pelaksanaan sosialisasi/ monitoring pelaksanaan NSP bidang keuangan 4. Tangkap layar JDIH PUPR atau website Eskopi Biro Keuangan	Semester I dan II	Semester I	1. Sudah disusun time-table pelaksanaan rapat berlantara termin kepada tujuan. 3. Terhadap NSP baru yang tersusun ditindaklajuti selain dengan penyebarluasan dokumen, dilakukan pula pelaksanaan sosialisasi kepada unit-unit Kerja terkait yang kiranya terdampak oleh peraturan tersebut. 4. Telah dilakukan koordinasi dengan biro hukum untuk mengupload NSP yang telah diterapkan untuk ditayangkan pada situs jidh PUPR.	1. Proses permohonan koreksi dan paraf ke unit-unit kerja terkait masih dilakukan secara fisik dengan mengedarkan berkas hardcopy, meskipun dalam surat pengantar dicantumkan tanggal keuangan, tetapi ada kemungkinan berkas tetap terlambat disampaikan. 2. Proses permohonan persetujuan dan paraf pimpinan terdapat ketumikan terdapat catatan sehingga perlu dilakukan pembahasan ulang dengan stakeholders dan diajukan ulang proses legal drafting dan pernyataan kepada pimpinan.
6	NSP Keuangan yang disusun tidak sepenemu dapat diterapkan (inapplicable)	Mengurangi kemungkinan	1. Melakukan pembahasan rancangan NSP dengan para stakeholder dalam rangka memperoleh masukan substansi (uju publik). 2. Pengumpulan data peraturan terkait, setiap kali dilakukan penyusunan rancangan NSP untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan penggunaan dasar hukum sebagai referensi	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran	1. Surat undangan, dokumentasi, dan notulensi atau lembar koreksi/paraf persetujuan 2. Database dasar hukum dan peraturan dalam rancangan NSP Keuangan	Semester I dan II	Semester I	1. Terhadap rancangan produk NSP selaku dilakukan rapat pembahasan dengan stakeholder untuk mendapatkan masukan dan koreksi, serta dimintakan paraf persetujuan menggunakan format lembar koralai sebelum disampaikan ke biro hukum dalam rangka permohonan legal drafting. 2. Dalam dokumen rancangan terdapat bagian yang mencantumkan daftar peraturan-peraturan terkait yang dijadikan referensi.	Terdapat beberapa materi dalam peraturan yang masih menggunakan tata bahasa yang menimbulkan penafsiran ganda sehingga diartikan berbeda oleh beberapa pengguna NSP.
7	Kesalahan dalam Penyajian dan pencatatan Aset Tetap	Mengurangi kemungkinan	Pembuatan Form Peminjaman dan Pengembalian Aset Tetap secara online	Kepala Sub Bagian TU	Rekap Peminjaman Aset Tetap	Triwulan	Triwulan I, Triwulan II	Telah dibuat Form Peminjaman Barang menggunakan Microsoft Forms	Penerapan Form Peminjaman dan Pengembalian baru berjalan secara efektif pada peminjaman aset di Sub Bagian Tata Usaha
8	Pembayaran Perjalanan Dinas tidak sesuai atau tidak sah (Penggunaan Daftar Pengeluaran Ril)	Mengurangi kemungkinan	Membuat daftar Peminjaman Penggunaan Daftar Pengeluaran Ril	PPK Satker Biro Keuangan	Rekapitulasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dengan menggunakan Daftar Pengeluaran Ril	Semester I dan II Tahun 2024	Semester I	1. Masih terdapat penggunaan Daftar Pengeluaran Ril di Biro Keuangan. Masih terdapat beberapa pembayaran perjalanan dinas menggunakan Daftar Pengeluaran Ril di Biro Keuangan yang tidak dapat diperoleh oleh pelaksana perjalanan dinas (contoh: tiket tol).	1. Berdasarkan PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap menggunakan DPR pasal 34 ayat (3) masih berlaku. 3. Adanya ketentuan dari BPK RI agar tidak menggunakan DPR

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Peranggung jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan/ Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Data Manajemen Risiko dari Unit Organisasi tidak lengkap dan terlambat disampaikan	Mengurangi Kemungkinan dan Dampak	1. Membuat Sistem Informasi Manajemen Risiko [K] 2. Revisi SE Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR (D)	Kepala Bagian Pebendaharaan	1. Sistem Informasi MR terbaru 2. Pedoman MR	1. Juni 2024 2. Juni 2024	1. Masih dalam proses 2. Masih dalam proses	1. Penyempurnaan Sistem masih mengungkapkan rancangan revisi SE agar sejalan dengan peraturan yang baru 2. Banyaknya penambahan substansi dan pedoman MR yang terbaru.	
10	Tingginya Gap antara Realisasi dan Halaman III DIPA	Mengurangi Kemungkinan	Sosialisasi dan monitoring kepada satker-satker yang memiliki hasil deviasi antara realisasi dan Hal III DIPA yang tinggi	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran	Surat Undangan Kegiatan dan Laporan Monitoring	Semester II	Sedang dalam proses pelaksanaan rangkaian kegiatan, akan diselesaikan nanti pada Bulan Desember Tahun Anggaran 2024	1. Surat Kepala Biro Keuangan Nomor PR.0201.SK.329 tanggal 22 Mei 2024 hal Pembuktian kembali pemutakhiran Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA periode Triwulan II Tahun 2024 dalam rangka penilaian Deviasi Halaman III DIPA 2. Kegiatan Pemanfaatan dan Evaluasi berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Nomor UM.0102.SK/359 tanggal 12 Juni 2024 hal Undangan FGD Kegiatan bantuan teknis peningkatan Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian PUPR TA 2024 di Surabaya 3. Kegiatan Pemanfaatan dan Evaluasi berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Nomor UM.0102.SK/284 tanggal 30 April 2024 hal Undangan FGD Kegiatan bantuan teknis peningkatan Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian PUPR TA 2024 di Tanggerang Selatan 4. Monitoring dan Evaluasi tentang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran khususnya Deviasi dan Capaian Output di Banjen dan Cirebon	1. Peserta sosialisasi dan monitoring tidak diikuti oleh Pejabat Perpendidikan Satker yang bersangkutan, sehingga tidak tercapai informasi dalam perbaikan IKPA 2. Surau kerja yang mengejola Pagu Negara akan memlikui deviasi yang tinggi karena terkendala terbitnya SP3 oleh KPPN KPH yang tidak bisa diperkirakan
11	Terdapat transaksi yang belum ditagging TKDN	Mengurangi Kemungkinan	Sosialisasi dan monitoring kepada satker-satker yang kurang disiplin menginput TKDN dalam aplikasi SAKTI	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran	Surat Undangan Kegiatan dan/ atau Laporan Monitoring	Semester II	Masih dalam proses	1. Surat Sekretaris Jenderal Nomor KU 0211-Mn/171 tanggal 14 Maret 2024 Hal Konfirmasi Data Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN)	Masih adanya satker yang kesulitan dalam penginputan TKDN dalam aplikasi SAKTI karena barang-barang yang pengadaan selain melalui eratalog tidak ada info kandungan TKDN
12	Laporan Penilaian PIPK	Mengurangi Kemungkinan tingkat KL yang disampaikan kepada Tim Penilai LKPP belum dilengkapi Hasil Reviu AP2P dan ada potensi terdapat catatan hasil reviu yang belum dapat ditindaklanjuti	Fasilitasi bimbingan dan pendampingan agar dapat dilakukan percepatan pelaksanaan penilaian PIPK tingkat Kementerian	Kepala Bagian Pelaporan dan Keuangan dan Pengendalian Intern	Laporan Pendampingan dan Laporan Penilaian	Semester II	Masih dalam proses	1. Penetapan dan sosialisasi Alur Signifikan telah dilakukan sebagaimana Surat Sején Nomor: KU0503-SJ/475 hal Penerapan PIPK pada Setjen TA 2024 2. Pendampingan perencanaan PIPK dilakukan sesuai permintaan pendampingan oleh Unit Organisasi, dan s.d 30 Juni telah dilakukan pendampingan kepada Ditjen Perumahan, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen BM. Unit Organisasi lainnya baru akan melaksanakan di periode TW III. 3. Pelaksanaan Bimtek bagi Tim Penilai akan dilaksanakan pada Semester II (akhir TW III)	Jakarta, Juli 2024 Kepala Biro Keuangan  NIP. 196704231998031001

TINJAUAN ATAS RISIKO BARU ATAU MASALAH YANG BELUM TERIDENTIFIKASI

Unit Pemilik Risiko : Biro Keuangan
Tahun : Triwulan II

No	Nama Kejadian	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Skor kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Risiko	Level Risiko	Respon Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								

Belum ditemukan risiko baru

Jakarta, Juli 2024
Kepala Biro Keuangan
Budhi Setiawan
NIP. 19670423198031001

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO
Unit Pemilik Risiko
Tahun
Periode

: Biro Keuangan
: 2024
: Triwulan II

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko Tahun	Risiko yang Direspon	Level Risiko Aktual			Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi
			Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko		
1	2	3	4	5	7	8	9	11
1	TLRHP belum terlaporkan (<i>upload ke SIPTL</i>).	0	2	4	13	2	4	13
2	Terdapat catatan MONSAKTI (ToDoList)	0	2	3	10	2	3	10
3	Laporan realisasi PNBP pada Satuan Kerja Kementerian PUPR kurang akurat dan terlambat disampaikan	0	2	4	13	2	4	13
4	Masih terdapat Pejabat Perbendaharaan yang belum/tidak bersertifikat	0	2	3	10	2	3	10
5	NSP bidang keuangan terlambat disusun dan/atau terlambat disosialisasikan	0	2	3	10	2	3	10
6	NSP Keuangan yang disusun tidak sepuuhnya dapat diterapkan (<i>inapplicable</i>)	0	2	3	10	2	3	10
7	Kesalahan dalam Penyajian dan pencatatan Aset Tetap	0	1	4	9	1	4	9
8	Pembayaran Perjalanan Dinas tidak sesuai atau tidak sah (Penggunaan Daftar Pengeluaran Ril)	0	1	4	9	1	4	9
9	Data Manajemen Risiko dari Unit Organisasi tidak lengkap dan terlambat disampaikan	0	1	3	5	1	3	5
10	Tingginya Gap antara Realisasi dan Halaman III DIPA	0	1	3	5	1	3	5

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi
			Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Tingginya Gap antara Realisasi dan Halaman III DIPA	0	1	3	5	1	3	5	0	Level Risiko Aktual belum dapat dihitung karena belum ada kejadian risiko dan belum ada inovasi yang selesai
11	Terdapat transaksi yang belum ditagging TKDN	0	1	3	5	1	3	5	0	Level Risiko Aktual belum dapat dihitung karena belum ada kejadian risiko dan belum ada inovasi yang selesai
12	Laporan Penilaian PIPK tingkat KL yang disampaikan kepada Tim Penilai LKPP belum dilengkapi Hasil Reviu APIP dan ada potensi terdapat catatan hasil reviu yang belum dapat ditindaklanjuti	0	1	2	3	1	2	3	0	Level Risiko Aktual belum dapat dihitung karena belum ada kejadian risiko dan belum ada inovasi yang selesai

Jakarta, Juli 2024
 Kepala Biro Kedangan

 Budni Setiawan
 NIP. 196704231998031001

No	Permaianan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggungjawab	Indikator (Output)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan/Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terdapat ketidakpuasan terhadap kinerja bahan informasi pimpinan dari para pengguna bahan informasi pimpinan	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	1. Menyusun Buku Panduan Penyusunan Bahan Informasi Pimpinan; 2. Menyediakan drive bersama untuk persiapan bahan informasi pimpinan yang bersifat berkala 3. Melakukan survei kepuasan pengguna bahan informasi pimpinan.	Kepala Bagian Laporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik	Hasil Survey keruasan pengguna bahan informasi pimpinan	Triwulan IV		<p>1. Hingga Triwulan II telah dilaksanakan penyusunan 39+ bahan informasi pimpinan dan seluruhnya disampaikan kepada pimpinan tepat waktu. Setiap penyusunan bahan informasi pimpinan dilaksanakan sesuai arahan pimpinan dan permintaan data komprehensif sesuai agenda rapat;</p> <p>2. Dilakukan FGD yang pertama dalam rangka penyusunan buku panduan penyusunan bahan informasi pimpinan.</p>	<p>1. Unit organisasi pemilik data seringkali membutuhkan waktu cukup lama mengirimkan data, sehingga tim pelaporan pimpinan bekerja over time untuk menyelesaikan tugas ini.</p> <p>2. Arahan penambahan substansi dari pimpinan saat finalisasi bahan mengakibatkan kebutuhan waktu penyelesaian bahan lebih panjang.</p> <p>3. Pada saat agenda menteri padat, kebutuhan bahan informasi pimpinan cukup banyak hingga 8-10 bahan informasi dengan tema berbeda-beda dan tengah waktu persiapan yang terbatas (kurang dari 4 jam). Rata-rata jumlah bahan yang disiapkan per harinya adalah 4 bahan dengan waktu penyelesaian rata-rata 8 jam.</p>
2	Terdapat kesalahan data dan informasi dalam bahan informasi pimpinan	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Menyusun Buku Panduan Penyusunan Bahan Informasi Pimpinan.	Kepala Bagian Laporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik	Bahan informasi pimpinan disusun dengan data valid terupdate	Triwulan IV		<p>1. Hingga Triwulan II telah dilaksanakan penyusunan 39+ bahan informasi pimpinan. Dalam setiap penyusunan unit organisasi pemilik data dilakukan dalam pengecekan bahan informasi final sebelum diserahkan kepada pimpinan. Selain itu juga diadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Laporan Pimpinan Kementerian PUJPR untuk updating data pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan dan 3T, infrastruktur pendidikan, dan pasar.</p> <p>2. Dilakukan FGD yang pertama dalam rangka penyusunan buku panduan penyusunan bahan informasi pimpinan.</p>	<p>1. Unit organisasi pemilik data memberikan waktu untuk memberikan feedback, sehingga konfirmasi dilaksanakan by telephone agar bahan informasi dapat segera difinalkan dan laporan pimpinan baken over time untuk menyelesaikan bahan informasi.</p> <p>2. Terdapat masukan pimpinan di akhir penyusunan bahan informasi yang harus segera dilindahlanjuti dengan permintaan data kepada unit terkait.</p>

No	Pemantauan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggungjawab	Indikator (Output)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan/Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Tingkat kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kementerian PUPR perlu ditingkatkan	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	1. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Melakukan survei indeks kepuasan pelayanan publik.	Kepala Bagian Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik	1. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Triwulan IV	7	Telah dilaksanakan review/peninjauan ulang terhadap Pedoman Mutu dan beberapa SOP dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 9001:2015. Revisi Pedoman mutu dan SOP tersebut telah disahkan oleh Kepala Biro Komunikasi Publik sejak Top Manajemen pada 27 Mei 2024. Selanjutnya, SMM diimplementasikan, akan dilaksanakan Audit internal. Dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 di Pelayanan Publik Terpadu Kementerian PUPR, pada Triwulan ke III 2024 akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Audit Internal Penerapan SMM ISO 9001:2015 yang melibatkan seluruh unit terkait, sebagai upaya persiapan pelaksanaan Audit internal.	Tingkat pemahaman terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM), khususnya pelaksanaan Audit internal di seluruh unit terkait masih relatif bervariasi
4	Tingkat kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Perpustakaan Kementerian PUPR perlu ditingkatkan	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	1. Pengembangan tenaga Perpustakaan melalui keikutsertaan dalam (seminar, pelatihan, lokakarya, dan bimbingan teknis) 2. Pengorganisasian bahan pustaka melalui pengolahan bahan monograf dan penambahan koleksi perpustakaan.	Kepala Bagian Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik	1. Sertifikat keikutsertaan tenaga Perpustakaan dalam (seminar, pelatihan, lokakarya, dan bimbingan teknis) 2. Digitalisasi Perpustakaan 3. Penambahan jumlah koleksi perpustakaan	Triwulan IV	1. Pengumpulan informasi terkait seminar, pelatihan, lokakarya dan semacamnya terkait bidang perpustakaan, 2) Pelaksanaan digitalisasi (data koleksi terlampir) dan 3) Penambahan koleksi buku dari sumber repositori buku-buku terbitan Kementerian PUPR yang mendefinisikan ISBN	Selama triwulan II telah dilaksanakan 1) Pengumpulan informasi terkait seminar, pelatihan, lokakarya dan semacamnya terkait bidang perpustakaan, 2) Pelaksanaan digitalisasi (data koleksi terlampir) dan 3) Penambahan koleksi buku dari sumber repositori buku-buku terbitan Kementerian PUPR yang mendefinisikan ISBN	Hambatan atau kendala diantaranya kapasitas pelatihan/diklat dan semacamnya yang terbatas masih terbatas
5	Pertanggungjawaban dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan belum optimal	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	1. Membuat checklist dokument administrasi pertanggungjawaban kegiatan 2. Penataan dan digitalisasi arsip yang baik	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan yang lengkap sesuai aturan yang berlaku	Triwulan IV	1. Menyiapkan checklist kelengkapan dokument administrasi keuangan untuk disampaikan kepada peranggungjawab dan pemroses negatif; 2. Penataan dan digitalisasi arsip SPM dan data pendukung terus dilaksanakan mulai awal tahun anggaran dan masih berjalan sampai sekarang	1. Keterbatasan SDM dalam mengolah dokumen pertanggungjawaban dan digitalisasi arsip. 2. Penataan dan digitalisasi arsip SPM dan data pendukung terus dilaksanakan mulai awal tahun anggaran dan masih berjalan sampai sekarang	

Jakarta, 16 Juli 2024
Kepala Biro Komunikasi Publik

Pantja Dharma Oetjojo
NIP.196704271991031003




PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN

Unit Pemilik Risiko : Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri
Tahun : 2024 : II
Triwulan : II

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan/ Kendala
1	Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal yang harus sesuai target	Mengurangi kemungkinan Risiko	Melakukan Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Setjen dari Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program	Nota Dinas Progres Tindak Lanjut Rekomendasi LHE SAKIP Setjen	Triwulan 6	Triwulan 7	masih dalam proses	Nota Dinas Nomor: PR.0302-S/222 Tanggal: 5 April 2024 Hal: Progress Tindak Lanjut Hasil Implementasi SAKIP Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2022
2	Revisi DIPA Satuan Kerja terlambat	Mengurangi frekuensi terjadinya risiko	1) Memperhatikan atau memeriksa kelengkapan dokumen/berkas revisi anggaran satuan kerja di awal waktu 2) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, DJA, dan satuan kerja terkait usulan revisi anggaran	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program	1) Kelengkapan berkas revisi DIPA Satuan Kerja	Triwulan 0	masih dalam proses	Belum lengkap atau belum sesuai berdasarkan anggaran sesuai PMK No 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1) Berita Acara hasil penelitian 2) LHR Itjen 3) BA Hasil Penelaahan DJA
3	Integrasi Data Antar Sistem Anggaran terlambat	Mengurangi kemungkinan Risiko		Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program	Data pengadaan barang jasa Taryang SIRUP yang termutakhirkan	Triwulan 0	masih dalam proses	Update Sistem SIRUP yang tidak bisa dipredksi (tidak reguler)	
4	Laporan Pantauan Kegiatan Strategis terlambat	Mengurangi kemungkinan Risiko	Monitoring dan Evaluasi secara elektronik melalui i-eMonitoring	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program	Menu Tagging Kegiatan Strategis Kementerian PUPR pada Sistem i-eMonitoring	Triwulan IV	masih dalam proses	Tidak stabilnya koneksi jaringan internet dalam proses tagging dan inputting pelaporan pada Sistem i-eMonitoring	Laporan Pelaksanaan Tagging dan Pelaporan Kegiatan Strategis Kementerian PUPR
5	Pelaksanaan proses persetujuan izin Kontrak Tahun Jamak Unor membutuhkan waktu yang lama	Mengurangi frekuensi terjadi risiko	Penyusunan SOP pengajuan persetujuan izin Kontrak Tahun Jamak - Sosialisasi - Monitoring	Kepala Bagian Administrasi Penganggaran	SOP Pengajuan Persetujuan Izin Kontak Tahun Jamak	Triwulan IV	masih dalam proses	1. Pengajuan Persetujuan Izin Kontrak Tahun Jamak. 2. Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang memadai mengakibatkan proses persetujuan izin KTJ membutuhkan waktu yang lama. 3. Kelengkapan berkas usulan persetujuan izin KTJ yang diterima cenderung tidak lengkap sehingga menghambat proses persetujuan izin Kotrak Tahun Jamak.	Upaya pencegahan risiko terus dilaksanakan secara berkelanjutan

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan/ Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Kualitas dan kuantitas pelaksanaan penelitian dan review RKA-KL Kementerian PUPR	Mengurangi frekuensi terjadi risiko	Penyusunan SOP petunjuk pelaksanaan penelitian dan review - Sosialisasi - Monitoring	Kepala Bagian Administrasi Penganggaran	Juknis Pelaksanaan Penelitian dan Review	Triwulan IV	masih dalam proses	Proses Penyusunan juknis Pelaksanaan penelitian review	Prioritas kegiatan di Bagian Kerja Sama Luar Negeri yang belum memungkinkan untuk melakukan penyusunan SOP Administrasi Penugasan dan Perizinan Tenaga Ahli Warga Negara Asing
7	Keterlambatan proses perizinan Tenaga Ahli Warga Negara Asing (TA-WNA) menyebabkan terhambatnya pelaksanaan proyek bantuan teknis di Kementerian PUPR	Mengurangi frekuensi terjadinya Risiko	Penyusunan SOP Administritasi Penugasan dan Perizinan Tenaga Ahli Warga Negara Asing	Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri	SOP Administrasi Penugasan dan Perizinan Tenaga Ahli Warga Negara Asing	Bulanan	masih dalam proses	Upaya pencegahan risiko terus dilaksanakan secara berkelanjutan	Prioritas kegiatan di Bagian Kerja Sama Luar Negeri yang belum memungkinkan untuk melakukan penyusunan SOP Administrasi Penugasan dan Perizinan Tenaga Ahli Warga Negara Asing
8	Keterlambatan proses perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dapat berimplikasi pada tertundanya waktu keberangkatan pejabat/pegawai yang melakukn PDLN	Mengurangi frekuensi terjadinya Risiko	Pengembangan Sistem Monitoring e-ILN Kementerian PUPR	Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri	Sistem Monitoring e-ILN Kementerian PUPR	Bulanan	masih dalam proses	Upaya pencegahan risiko terus dilaksanakan secara berkelanjutan	Prioritas kegiatan di Bagian Kerja Sama Luar Negeri yang belum memungkinkan untuk melakukan pengembangan sistem e-ILN
9	Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran masih rendah	Mengurangi kemungkinan Risiko	Melakukan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana	Kasubag.TU	Nilai IKPA meningkat	Triwulan IV	masih dalam proses	Monev Rencana Penarikan Dana	Rencana Kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan
10	Pengelolaan BMN masih belum Optimal	Mengurangi frekuensi terjadinya Risiko	Sistem Informasi updating data aset BMN	Kasubag.TU	Sistem Informasi updating data asset BMN	Triwulan IV	masih dalam proses	Inventarisasi awal data asset BMN	Aset BMN yang jumlahnya sangat banyak hasil dari Penggabungan 3 Satker menjadi 1 satker dan data dukung masih ada yang kurang lengkap
11	Formasi Jenjang Jabatan Pegawai Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri belum tersedia	Mengurangi frekuensi terjadinya Risiko	Standar Penyusunan Formasi	Kasubag.TU	Formasi Jabatan	Triwulan IV	masih dalam proses	Pemenuhan Kebutuhan Formasi	Prioritas Pemenuhan Jenjang Formasi Jabatan Pegawai
12	Penyusunan SAKIP Biro tertambat	Mengurangi frekuensi terjadinya Risiko	Pedoman penyusunan SAKIP Biro PAKLN	Kasubag.TU	Pedoman Penyusunan SAKIP Biro PAKLN	Triwulan IV	masih dalam proses	Inventarisasi awal Penyusunan SAKIP Biro PAKLN	Data Dukung yang belum lengkap



Jakarta, 10 Juli 2024
Kepala Biro Perencanaan Anggaran
Dan Kerja Sama Luar Negeri

Ir. Eddy Juharyyah, M.Tech.
NIP. 196705121993031004

TINJAUAN ATAS RISIKO BARU ATAU MASALAH YANG BELUM TERIDENTIFIKASI
: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri
: 2024 (Triwulan II)
Unit Pemilikan Risiko
Faham

No	Nama Kejadian	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Skor kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Risiko	Level Risiko	Respon Risiko
1	Tidak ada Resiko Baru	Tidak ada Resiko Baru	Tidak ada Resiko Baru	5	6	7	8	9

Jakarta, 10 Juli 2024
Kepala Biro Perencanaan Anggaran
dan Kerja Sama Luar Negeri


Ir. Edy Juharsyah, M.Tech.
NIP. 196705121993031004

Lakshmi 10 July 2021

Das neue Gesetz

Ir. Edi Juharsyah M.Tech
NIP. 196705121993031004

Jakarta, 10 Juli 2024
Kepala Biro Perencanaan Anggaran
dan Kerja Sama Luar Negeri

[Signature]

Iri Edy Juharsyah, M.Tech
NIP. 196705121993031004

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO
Unit Pemilik Risiko
Tahun

: Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri
: 2024 (Triwulan II)

No	Pernyataan Risiko	Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Sesilah Besaran Risiko	Rekomendasi
		Kejadian Risiko 1 Tahun	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak		
1	Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal yang harus sesuai target	1	1	2	3	3	2	8	-5
2	Revisi DIPA Satuan Kerja terlambat	3	2	2	7	3	2	8	-1
3	Integrasi Data Antar Sistem Anggaran terlambat	1	2	2	7	3	2	8	-1
4	Laporan Pantauan Kegiatan Strategis terlambat	4	2	2	7	3	2	8	-1
5	Pelaksanaan proses persetujuan izin Kontrak Tahun Jamak Unor membutuhkan waktu yang lama	6	1	3	5	2	4	13	-8
6	Kualitas dan kuantitas pelaksanaan penelitian dan review RKA-KL Kementerian PUPR	2	2	3	10	5	2	15	-5
7	Keterlambatan proses perizinan Tenaga Ahli Warga Negara Asing (TA-WNA) menyebabkan terhambatnya pekerjaan proyek bantuan teknis di Kementerian PUPR	1Kai	3	3	14	2	3	10	4
8	Keterlambatan proses perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dapat berimplikasi pada tertundanya waktu keberangkatan pejabat/pegawai yang melakukan PDLN	1Kai	3	3	14	2	3	10	4

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun			Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Selsih Besaran Risiko	Rekomendasi
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
9	Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran masih rendah	2 Kali	4	3	16	3	3	14	2	Pengendalian resiko tetap dilaksanakan dan perlu dievaluasi untuk pembaharuan dengan mengantisipasi dampak yang pernah terjadi dari resiko sebelumnya agar tidak kembali terjadi		
10	Pengelolaan BMN masih belum Optimal	2 Kali	3	2	16	3	3	14	2	Pengendalian resiko tetap dilaksanakan dan perlu dievaluasi untuk pembaharuan dengan mengantisipasi dampak yang pernah terjadi dari resiko sebelumnya agar tidak kembali terjadi		
11	Formasi Jenjang Jabatan Pegawai Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri belum tersedia	2 Kali	3	2	8	2	2	7	1	Pengendalian resiko tetap dilaksanakan dan perlu dievaluasi untuk pembaharuan dengan mengantisipasi dampak yang pernah terjadi dari resiko sebelumnya agar tidak kembali terjadi		
12	Penyusunan SAKIP Biro terlambat	2 Kali	3	2	8	2	2	7	1	Pengendalian resiko tetap dilaksanakan dan perlu dievaluasi untuk pembaharuan dengan mengantisipasi dampak yang pernah terjadi dari resiko sebelumnya agar tidak kembali terjadi		

Jakarta, 10 Juli 2024
Kepala Biro Perencanaan Anggaran
Dan Kerja Sama Luar Negeri



Ir. Edy Juharsyah, M.Tech.
NIP. 196705121993031004

PROFIL RISIKO
UNIT KERJA
PERIODE

: Biro Pengelolaan Barang Milik Negara
: Triwulan II Tahun 2024

PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambaran/Kendala
1	<p>1. Terdapat persetujuan hibah yang belum ditindaklanjuti dengan BAST hingga 3 (tiga) bulan sesudah tanggal persetujuan hibah ditandatangani dan dihapus dari daftar BMN 2 (dua) bulan sejak BAST Hibah (SK Penghapusan).</p> <p>2. Penyelegararaan evaluasi capaian target melalui rapat kerja</p> <p>3. Pelaksanaan Seremoni Serah Terima Hibah BMN di tingkat Kementerian maupun Eselon I</p> <p>4. Surat Sekretaris Jenderal terkait Percepatan Tindak Lanjut Hibah BMN</p> <p>5. Tersusunnya Peraturan terkait Kebijakan Penetapan Batas Waktu dan Konsekuensi Keterlambatan Penyelesaian Tindak Lanjut Persetujuan Hibah BMN</p>	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	<p>1. Penerapan aplikasi e-BMN modul Hibah dalam pengusulan persetujuan hibah BMN</p> <p>2. Penyelegararaan evaluasi capaian target melalui rapat kerja</p> <p>3. Pelaksanaan Seremoni Serah Terima Hibah BMN</p> <p>4. Surat Sekretaris Jenderal terkait Percepatan Tindak Lanjut Hibah BMN</p> <p>5. Terbitnya Peraturan Kebijakan Penetapan Batas Waktu dan Konsekuensi Keterlambatan Penyelesaian Tindak Lanjut Persetujuan Hibah BMN</p>	Kepala Bagian PBMN I dan Kepala Bagian PBMN II	<p>1. Tindak Lanjut Hibah termonitor dan update dalam aplikasi e-BMN</p> <p>2. Terlaksananya rapat kerja Pengelolaan BMN yang belum selesai</p> <p>3. Terlaksananya Seremoni Serah Terima Hibah BMN</p> <p>4. Surat Sekretaris Jenderal terkait Percepatan Tindak Lanjut Hibah BMN</p> <p>5. Terbitnya Peraturan Kebijakan Penetapan Batas Waktu dan Konsekuensi Keterlambatan Penyelesaian Tindak Lanjut Persetujuan Hibah BMN</p>	5	6	7	8
2	Terdapat BMN di Kementerian PUPR yang belum ditekankan status penggunaannya 6 (enam) bulan sejak pengadaan sesuai ketentuan PMK 246/PMK.6/2014	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	1. Menjadikan PSP sebagai salah satu indikator dalam persetujuan RKBMN pemeliharaan	Kepala Bagian PBMN I, Kepala Bagian PBMN II dan Kepala Bagian FPP	<p>1. Surat Sekretaris Jenderal Pengelolaan BMN terkait Percepatan Progress PSP BMN Kementerian PUPR dan pemberian sanksi pada usulan RKBMN pemeliharaan</p>	1. Januari	1. Januari	9	10

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan/ Kendala
1	Terjadinya kesalahan input kodeifikasi BMN	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Terjadinya kesalahan input kodeifikasi BMN	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	1. Melakukan monitoring berkala melalui Laporan Barang Pengguna hasil cetakan Aplikasi MONSAKTI 2. Dilakukan Monitoring, Pembinaan dan Pendampingan Penatausahaan BMN Tingkat Satker di beberapa Provinsi yang di dalamnya menyampaikan terkait Kodeifikasi BMN, potensi kesalahan kodefikasi, dan perbaikan kesalahan kodefikasi.	Kepala Bagian FPP	1. Monitoring dan Monsakti 2. Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan	1. Semester I, Semester II 2. Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024	1. Triwulan I 2. Triwulan II	1.1 Telah dilakukan kegiatan monitoring dan pembinaan penatausahaan BMN lingkuk Satuan Kerja serta pendampingan pemeriksaan BPK-RD di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15-16 Februari 2024, sesuai ST Nomor 52/ST/Kabag FPP/Biro/PBMN/I/2024 tanggal 12 Februari 2024 1.2 Tangkapan layar Monitoring dari aplikasi MONSAKTI 2. Telah dilakukan pendampingan pada kegiatan Koreksi Audited Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2023 pada tanggal 3 Mei 2024 sesuai dengan ST Kepala Bagian FPP nomor 156/ST/kabag FPP/Biro/PBMN/V/2024 tanggal 2 Mei 2024	Belum ada
4	Terdapat tanah Kementerian PUPR yang dikuasai secara fisik oleh pihak lain secara tidak sah (okupasi)	Mengurangi dampak risiko	1. Penerapan fitur geotagging untuk seluruh BMN berupa tanah di lingkungan Kementerian PUPR dan pencantuman QR code BMN berupa tanah pada seluruh plang papan nama kepemilikan Aset PUPR 2. Menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja untuk segera melakukan pengamanan asset baik berupa administrasi, fisik dan hukum berupa perkuatan hak dengan melakukan sertifikasi	Kepala Bagian FPP	1. Monitoring Penerapan Geotagging pada unit organisasi; 2. Kebijakan melalui Surat Kepala Biro Pengelolaan BMN terkait pengamanan BMN dan target sertifikasi pada tahun berjalan	1. Semester II 2. Triwulan I	1. - 2. Triwulan I	2.1 Surat Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Nomor PS 0502-Sb/132 tanggal 31 Januari 2024 hal Target Program Percepatan Penerbitkan BMN berupa Tanah Kementerian PUPR TA 2024 2.2 Nota Dinas Sekretaris Jenderal Nomor 65/ND/Si/2024 tanggal 16 Januari 2024 Hal Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Pengamanan dan Penetapan Barang Milik Negara (BMN) Sisa Pembebasan Tanah Jalan Tol Becakayu	Belum ada
5	Terdapat usulan/ persetujuan pemantauan BMN yang belum/ tidak ditindaklanjuti	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	1. Melaksanakan monitoring atas persetujuan Pemanfaatan BMN yang belum ditindaklanjuti oleh Satker menggunakan e-BMN 2. Menginstruksikan kepada seluruh Satker untuk melaporkan pelaksanaan wasdal atas pelaksanaan wasdal atas 3. Menyusun konsep perubahan Kepriren PUPR Nomor 75/KPT/S/MI/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan BMN di Kementerian PUPR 4. Menyusun plugin pemantauan BMN dalam aplikasi e-BMN	Kepala Bagian FPP	1. Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan BMN 2. Laporan Pelaksanaan Wasdal pemanfaatan BMN 3. Perubahan Keputusan Menteri PUPR No. 75/KPT/S/MI/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan BMN di Kementerian PUPR 4. Plugin pemantauan BMN pada aplikasi e-BMN	1. Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024 2. Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024 3. Desember 4. Triwulan IV	1. Triwulan I 2. Triwulan II 3. - 4. -	1. Telah dilaksanakannya Konsolidasi Data BMN yang di dalamnya terdapat kegiatan monitoring terkait pemanfaatan BMN sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro BMN Nomor 57/8/NDS/bi/2024 tanggal 13 maret 2024 Hal Penyampaian Hasil Workshop dan Konsolidasi Data Pengelolaan BMN dalam rangka Pengukuran Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian PUPR Tahun 2024 2. Proses Monitoring Penghapusan BMN Tahun 2024 telah disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Bagian FPP Kepada Kepala Biro Pengelolaan BMN melalui Nota Dinas Nomor 36/ND/SB/3/2024 Tanggal 4 Juli 2024 hal Penyampaian Progres Monitoring Pemanfaatan BMN di Lingkungan Kementerian PUPR	Belum ada

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator Keluaran	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambaran/Kendala
1	6 Terdapat Aset yang dihitungnya belum ditindaklanjuti dengan pemindahtempat dan penghapusan dari daftar barang KPB sehingga neraca satuan kerja tidak akurat dan berpotensi menjadi temuan auditor	Mengurangi kemungkinan terjadinya risiko	1. Memonitoring proses proses penghapusan melalui Worksheet 2. Pelaksanaan monitoring melalui rapat kerja	Kepala Bagian PBMN I dan Kepala Bagian PBMN II	5	6	7	8	10
2	Belum tertibnya Penatausahaan Rumah Negara Golongan I dan II di lingkungan Kementerian PUJPR	Mengurangi dampak risiko	1. Melakukan Monitoring dalam rangka terbit administrasi yang meliputi: -Masa berlakunya Surat Ijin Penghunian Rumah Negara -Golongan Rumah Negara, Tipe Rumah Negara, Pembayaran dan tunggatan sewa Rumah Negara	Kepala Bagian FPP	1. Kepala Bagian PBMN	1. Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024	1. Triwulan II Februari	1. Progres Monitoring Penghapusan BMN Tahun 2024 telah disampaikan melalui Nota Dinas Kepala Bagian Pengelolaan BMN I dan II kepada Kepala Biro Pengelolaan BMN melalui Nota Dinas Nomor 34/NDSB/I/2024 Tanggal 19 Juni 2024 hal Penyampaian Progres Monitoring Penggunaan, Perindah tangganan, dan Penghapusan BMN Tahun 2024	Belum ada
3					2. Rapat Kerja Pengelolaan Barang Milik Negara	2. September		2. Telah dilaksanakan Konsolidasi Data BMN sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro PBMN Nomor 578/ND/Sb/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Penyampaian Hasil Workshop dan Konsolidasi Data Pengelolaan BMN dalam rangka Peningkatan Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Kementerian PUJPR Tahun 2024	
4								1. Surat Kepala Biro Pengelolaan BMN terkait Penetapan Rumah Negara Golongan I dan Golongan II	1. -
5								1.1 Nota Dinas Kepala Biro PBMN Nomor 574/NDSB/2024 Tanggal 8 Maret 2024 hal Laporan Hasil Pemberhasan Tindak Lanjut Pemanfaatan Aset Wisma Atlet Kemayoran	
6								1.2 Nota Dinas Kepala Biro PBMN Nomor 603/NDSB/2024 tanggal 18 Maret 2024 hal Penyampaian Masukan dan Koreksi terhadap Konsep Surat Keputusan Menteri PUJPR tentang Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I (Satu)Rumah Jabatan di lingkungan Kementerian PUJPR	
7								1.3 Surat Kepala Biro Pengelolaan BMN Nomor RU0803-Sb/177 tanggal 6 Februari 2024, hal Fasilitasi Percepatan Penerbitan SIP Rusun ASN Kementerian PUJPR	
8								1.4 Surat Kepala Biro Pengelolaan BMN Nomor RU0803-Sb/662 tanggal 26 Juni 2024, hal Monitoring dan Evaluasi Hunian Rusun ASN Kementerian PUJPR	

Bukti dukung dapat diakses pada link : <https://bit.ly/BuktidukungMRBiroPBMN>

Jakarta, 5 Juli 2024
 Kepala Biro
 Pengelolaan Barang Milik Negara,

 Darwanto
 NIP. 19661291996031002

**Unit Pemilik Risiko
Tahun**

: Biro Pengelolaan BMN
: 2024

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Selsih Besaran Risiko	Rekomendasi
			Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Inovasi akan diselesaikan segera mungkin
1	Terdapat persetujuan hibah yang belum ditindaklanjuti dengan BAST hingga 3 (tiga) bulan sesudah tanggal persetujuan hibah ditandatangani dan dihapus dari daftar BMN 2 (dua) bulan sejak BAST Hibah (SK Penghapusan)	10 ≤ x ≤12	4	4	19	3	4	17	2	Inovasi telah selesai dilakukan, namun masih perlu adanya pemantauan
2	Terdapat BMN di Kementerian PUPR yang belum ditetapkan status penggunaannya 6 (enam) bulan sejak pengadaan sesuai ketentuan PMK 246/PMK.6/2014	10 ≤ x ≤12	4	4	19	4	4	19	0	Inovasi akan diselesaikan segera mungkin
3	Terjadinya kesalahan input kodenifikasi BMN	6 ≤ x ≤9	3	3	14	3	3	14	0	Inovasi akan diselesaikan segera mungkin
4	Terdapat tanah Kementerian PUPR yang dikuasai secara fisik oleh pihak lain secara tidak sah (okupasi)	6 ≤ x ≤9	3	3	14	3	3	14	0	Inovasi akan diselesaikan segera mungkin

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi
			Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5 Terdapat usulan/ persetujuan pemanfaatan BMN yang belum/ tidak ditindaklanjuti	6 ≤ x ≤9	3	3	14	3	3	14	0	Inovasi akan diselesaikan segera mungkin
6	Terdapat Aset yang dihitungkan penggunaannya, namun belum ditindaklanjuti dengan pemindahtahanan dan penghapusan dari daftar barang KPB sehingga neraca satuan kerja tidak akuntabel dan berpotensi menjadi temuan auditor	6 ≤ x ≤9	3	3	14	3	3	14	0	Inovasi akan diselesaikan segera mungkin
7	Belum tertibnya Penatausahaan Rumah Negara Golongan I dan II di lingkungan Kementerian PUPR	6 ≤ x ≤9	3	2	12	3	2	12	0	Inovasi akan diselesaikan segera mungkin

Jakarta, 5 Juli 2024

Kepala Biro

Pengelolaan Barang Milik Negara,


Darwanto

NIP. 196611291996031002

TINJAUAN ATAS RISIKO BARU ATAU MASALAH YANG BELUM TERIDENTIFIKASI

Unit Pemilik Risiko : Biro Pengelolaan BMN
Tahun : Triwulan II Tahun 2024

No	Nama Kejadian	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Risiko	Level Risiko	Respon Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								

N I H I L

Jakarta, 5 Juli 2024
Kepala Biro
Pengelolaan Barang Milik Negara,

Darwanto
NIP. 196611291996031002

No	Permaianan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggungjawab	Indikator (Output)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan/Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terdapat ketidakpuasan terhadap kinerja bahan informasi pimpinan dari para pengguna bahan informasi pimpinan	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	1. Menyusun Buku Panduan Penyusunan Bahan Informasi Pimpinan; 2. Menyediakan drive bersama untuk persiapan bahan informasi pimpinan yang bersifat berkala 3. Melakukan survei kepuasan pengguna bahan informasi pimpinan.	Kepala Bagian Laporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik	Hasil Survey keruasan pengguna bahan informasi pimpinan	Triwulan IV		<p>1. Hingga Triwulan II telah dilaksanakan penyusunan 39+ bahan informasi pimpinan dan seluruhnya disampaikan kepada pimpinan tepat waktu. Setiap penyusunan bahan informasi pimpinan dilaksanakan sesuai arahan pimpinan dan permintaan data komprehensif sesuai agenda rapat;</p> <p>2. Dilakukan FGD yang pertama dalam rangka penyusunan buku panduan penyusunan bahan informasi pimpinan.</p>	<p>1. Unit organisasi pemilik data seringkali membutuhkan waktu cukup lama mengirimkan data, sehingga tim pelaporan pimpinan bekerja over time untuk menyelesaikan tugas ini.</p> <p>2. Arahan penambahan substansi dari pimpinan saat finalisasi bahan mengakibatkan kebutuhan waktu penyelesaian bahan lebih panjang.</p> <p>3. Pada saat agenda menteri padat, kebutuhan bahan informasi pimpinan cukup banyak hingga 8-10 bahan informasi dengan tema berbeda-beda dan tengah waktu persiapan yang terbatas (kurang dari 4 jam). Rata-rata jumlah bahan yang disiapkan per harinya adalah 4 bahan dengan waktu penyelesaian rata-rata 8 jam.</p>
2	Terdapat kesalahan data dan informasi dalam bahan informasi pimpinan	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	Menyusun Buku Panduan Penyusunan Bahan Informasi Pimpinan.	Kepala Bagian Laporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik	Bahan informasi pimpinan disusun dengan data valid terupdate	Triwulan IV		<p>1. Hingga Triwulan II telah dilaksanakan penyusunan 39+ bahan informasi pimpinan. Dalam setiap penyusunan unit organisasi pemilik data dilakukan dalam pengecekan bahan informasi final sebelum diserahkan kepada pimpinan. Selain itu juga diadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Laporan Pimpinan Kementerian PUJPR untuk updating data pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan dan 3T, infrastruktur pendidikan, dan pasar.</p> <p>2. Dilakukan FGD yang pertama dalam rangka penyusunan buku panduan penyusunan bahan informasi pimpinan.</p>	<p>1. Unit organisasi pemilik data memberikan waktu untuk memberikan feedback, sehingga konfirmasi dilaksanakan by telephone agar bahan informasi dapat segera difinalkan dan laporan pimpinan baken over time untuk menyelesaikan bahan informasi.</p> <p>2. Terdapat masukan pimpinan di akhir penyusunan bahan informasi yang harus segera dilindahlanjuti dengan permintaan data kepada unit terkait.</p>

No	Pemantauan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggungjawab	Indikator (Output)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan/Kendala
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Tingkat kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kementerian PUPR perlu ditingkatkan	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	1. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Melakukan survei indeks kepuasan pelayanan publik.	Kepala Bagian Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik	1. Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Triwulan IV	7	Telah dilaksanakan review/peninjauan ulang terhadap Pedoman Mutu dan beberapa SOP dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) 9001:2015. Revisi Pedoman mutu dan SOP tersebut telah disahkan oleh Kepala Biro Komunikasi Publik sejak Top Manajemen pada 27 Mei 2024. Selanjutnya, SMM diimplementasikan, akan dilaksanakan Audit internal. Dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 di Pelayanan Publik Terpadu Kementerian PUPR, pada Triwulan ke III 2024 akan dilaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Audit Internal Penerapan SMM ISO 9001:2015 yang melibatkan seluruh unit terkait, sebagai upaya persiapan pelaksanaan Audit internal.	Tingkat pemahaman terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM), khususnya pelaksanaan Audit internal di seluruh unit terkait masih relatif bervariasi
4	Tingkat kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan Perpustakaan Kementerian PUPR perlu ditingkatkan	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	1. Pengembangan tenaga Perpustakaan melalui keikutsertaan dalam (seminar, pelatihan, lokakarya, dan bimbingan teknis) 2. Pengorganisasian bahan pustaka melalui pengolahan bahan monograf dan penambahan koleksi perpustakaan.	Kepala Bagian Pelaporan Pimpinan dan Pembinaan Pelayanan Publik	1. Sertifikat keikutsertaan tenaga Perpustakaan dalam (seminar, pelatihan, lokakarya, dan bimbingan teknis) 2. Digitalisasi Perpustakaan 3. Penambahan jumlah koleksi perpustakaan	Triwulan IV	1. Pengumpulan informasi terkait seminar, pelatihan, lokakarya dan semacamnya terkait bidang perpustakaan, 2) Pelaksanaan digitalisasi (data koleksi terlampir) dan 3) Penambahan koleksi buku dari sumber repositori buku-buku terbitan Kementerian PUPR yang mendefinisikan ISBN	Selama triwulan II telah dilaksanakan 1) Pengumpulan informasi terkait seminar, pelatihan, lokakarya dan semacamnya terkait bidang perpustakaan, 2) Pelaksanaan digitalisasi (data koleksi terlampir) dan 3) Penambahan koleksi buku dari sumber repositori buku-buku terbitan Kementerian PUPR yang mendefinisikan ISBN	Hambatan atau kendala diantaranya kapasitas pelatihan/diklat dan semacamnya yang terbatas masih terbatas
5	Pertanggungjawaban dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan belum optimal	Mengurangi kemungkinan terjadinya resiko	1. Membuat checklist dokument administrasi pertanggungjawaban kegiatan 2. Penataan dan digitalisasi arsip yang baik	Kepala Subbagian Tata Usaha	Dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan yang lengkap sesuai aturan yang berlaku	Triwulan IV	1. Menyiapkan checklist kelengkapan dokument administrasi keuangan untuk disampaikan kepada peranggungjawab dan pemroses negatif; 2. Penataan dan digitalisasi arsip SPM dan data pendukung terus dilaksanakan mulai awal tahun anggaran dan masih berjalan sampai sekarang	1. Keterbatasan SDM dalam mengolah dokumen pertanggungjawaban dan digitalisasi arsip. 2. Penataan dan digitalisasi arsip SPM dan data pendukung terus dilaksanakan mulai awal tahun anggaran dan masih berjalan sampai sekarang	

Jakarta, 16 Juli 2024
Kepala Biro Komunikasi Publik

Pantja Dharma Oetjojo
NIP.196704271991031003




**PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN
BIRO KEPERGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
TAHUN 2024**

Unit Pemilik Risiko : Biro Kepergawainan, Organisasi dan Tata Laksana
Tahun : 2024

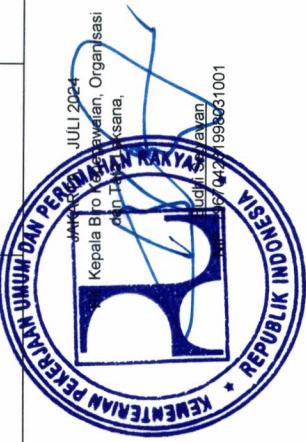
No.	Penyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator (Keleuaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan/ Kendala
1	Menurunnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Pengelolaan terhadapnya risiko terutama pada Aspek Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	Mengurangi Kemungkinan terjadinya risiko	Membuat Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	Kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	6 November	7 Dalam Proses	Sudah melaksanakan diskusi awal terkait Pedoman Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan yang akan dibuat (Menunggu Kebijakan Pelaksanaan Pengadanan ASN Tahun 2024)	-
2	Proses Mutasi Pegawai tidak sesuai dengan Prosedur yang benar (Usul Mutasi tidak memenuhi Kriteria)	Mengurangi Kemungkinan terjadinya risiko	Terbitnya Surat Edaran Tata Cara Mutasi Kepergawainan di Kementerian PUPR	Kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	Surat Edaran Tata Cara Mutasi Kepergawainan di Kementerian PUPR	7 Juli	8 Dalam Proses	Sudah di tahap penyelesaian akhir, sedang menunggu arahan dan persetujuan pimpinan	-
3	Adanya pihak yang menyalurkan kewenangan dalam pendistribusian penghargaan dengan menerima/meniminta sejumlah uang dan dugaan tanda kehormatan presiden Saya Lencana	Mengurangi Kemungkinan terjadinya risiko	Peningkatan Penyampaikan Informasi aur usulan penghargaan di Lingkungan Kementerian PUPR melalui SOP dan infografis	Kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	SOP dan Infografis tentang Pengusulan Penghargaan sebagai media Sosialisasi	7 Juli	7 Dalam Proses	1. Telah dilakukan diskusi internal terkait rancangan SOP dan Infografis 2. Telah dilakukan koordinasi dengan unit dalam kegiatan verifikasi data usulan tahunya RI pada bulan Maret,	-
4	Adanya tunutan/banding/gugatan hukum dari PNS yang diajukan hukuman disiplin kepada instansi	Mengurangi Kemungkinan terjadinya risiko	Penerbitan SOP, Buku Saku/Ebook, Saku/Ebook serta Revisi Kepmen Pendekatan Wewenang di Lingkungan Kementerian PUPR	Kepala Bagian Administrasi Perencanaan dan Pengembangan Pegawai	SOP, Buku Saku/Ebook, Revisi Kepmen Pendekatan Wewenang di Lingkungan Kementerian PUPR	7 Juli	7 Dalam Proses	Telah dilakukan diskusi internal terkait rancangan SOP, Ebook serta Revisi Kepmen	-
5	Potensi tidak validnya Angka Kredit konversi SKR untuk proses kenaikan jerang Jabatan Fungsional ataupun Kenaikan Pangkat	Mengurangi Kemungkinan terjadinya risiko	Penyajian Sistem/aplikasi terkait pengelolaan JF dan Regulasinya	Kepala Bagian Pengelolaan Jabatan Fungsional	Aplikasi Pengelolaan JF dan Surat Edaran (Regulasi)	September	September	1. Aplikasi terkait sedang dalam tahap pengembangan (UAT Modul dalam e-HRM) 2. Untuk SE dalam proses FGD dengan pihak-pihak terkait	Gangguan Pada PDN
6	Potensi tidak terit administrasi BMN terkait asset usak berai/ asset yang sudah tidak digunakan statusnya namun belum dilakukan penghapusan	Mengurangi Kemungkinan terjadinya risiko	Pembentukan Tim Percepatan Penghapusan BMN	Kepala Subbagian Tata Usaha	SK Penghapusan BMN	September	September	1. Peneritian SK Tim telah dilakukan di bulan Februari 2. Usulan penetapan status penggunaan (PS) dalam proses	Dalam Proses



**DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
TAHUN 2024**

Unit Pemilik Risiko	: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Tahun	: 2024

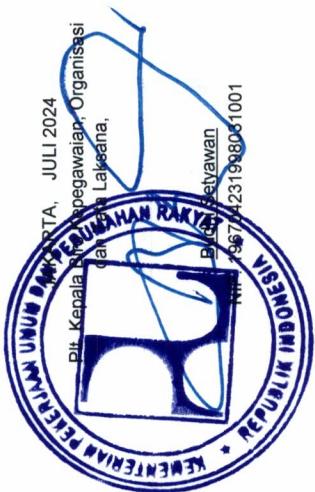
No	Pemylaaan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun			Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Rekomendasi
		Risiko	Frekuenpsi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuenpsi	Dampak	Besaran Risiko			
1	Menurunnya Kualitas Hasil	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyelenggaran Pengelolaan terutama pada Aspek Pelaksanaan Seleksi Kompetensi, Tambahan Proses Mutasi Pegawai tidak sesuai dengan Prosedur yang benar (Usul Mutasi tidak memenuhi Kriteria)	-	2	2	7	-	-	-	-	-	-
2	Mutasi tidak memenuhi Kriteria	-	2	3	10	-	-	-	-	-	-
3	Adanya pihak yang menyabotgurakan kewenangan dalam pendistribusian penghargaan dengan menyalahgunakan dan mengambil uang dan cuganan punya dalam pendistribusian tanda kehormatan presiden Satya Lencana	-	2	3	10	-	-	-	-	-	-
4	Adanya tuntutan/banding/jugutan disiplin kepada instansi	-	2	3	10	-	-	-	-	-	-
5	Pojensi tidak validnya Angka Kredit konversi SKP untuk proses kenaikan jerjiang Jabatan Fungsional ataupun Kenaikan Pangkat	-	2	3	10	-	-	-	-	-	-
6	Pojensi tidak teritik administrasi BMN terkait aset rusak berat/ aset yang sudah tidak digunakan statusing ramum belum dilakukan penghapusan	-	1	3	5	-	-	-	-	-	-



TINJAUAN ATAS RISIKO BARU ATAU MASALAH YANG BELUM TERIDENTIFIKASI
BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA
TAHUN 2024

Unit Pemilik Risiko	: Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Tahun	: 2024
Triwulan	: I

No	Nama Kejadian	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Risiko	Level Risiko	Respon Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Belum ditemukan risiko baru							



PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN

Unit Pemilik Risiko : Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah
Tahun : 2024
Periode : Triwulan II

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator (keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan/Kendala
1	Terjadi kolusi atau gratifikasi dalam persetujuan rencana kegiatan yang diusulkan Pemerintah Daerah	Mengurangi dampak terjadinya Risiko	1. Menyangkan arahan Bapak Menteri terkait 4 Big No's dan tayangkan video anti suap/gratifikasi di setiap pelaksanaan acara. 2. Memasang banner anti suap/gratifikasi dan 4 Big No's di setiap acara. 3. Membuat survei terkait gratifikasi. 4. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. 5. Penyusunan ISO Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 37001:2016	Seluruh Kepala Bidang di lingkungan PFID	1. Video arahan Bapak Menteri terkait 4 Big No's dan anti suap/gratifikasi 2. Banner anti suap/gratifikasi dan 4 Big No's. 3. Hasil survei gratifikasi. 4. Piacam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas. 5. Sertifikat ISO SMAP 37001:2016	1. November 2. November 3. November 4. - 5. November	1. Triwulan II 2. Triwulan II 3. Triwulan II 4. - 5. Triwulan II	1. Menayangkan video anti suap/gratifikasi pada pelaksanaan Bimtek eMon DAK Gel III dan Raker DAK 2. Pemasangan banner anti suap/gratifikasi dan 4 Big No's pada pelaksanaan Bimtek eMon DAK Gel III dan Raker DAK 3. Hasil Survey terkait gratifikasi pada pelaksanaan Bimtek eMon DAK Gel III dan Raker DAK 4. PFID saat ini telah berhasil mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001: 2016 5. PFID telah berkontrak dengan PT. Forestcitra Sejahtera dalam Pendampingan dan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 pada tanggal 7 Mei 2024 (6 bulan) serta melaksanakan kegiatan Pelatihan Pemahaman ISO 37001:2016 SMAP dan Workshop Bribery Risk Assessment kepada pegawai pada tanggal 11 s.d 12 Juni 2024 di Bekasi sesuai dengan Surat Undangan Nomor UN/0102-Sf/166	1. Tidak ada hambatan/sudah terlaksana 2. Tidak ada hambatan/sudah terlaksana 3. Tidak ada hambatan/sudah terlaksana 4. Proses pengumpulan bukti dukung terkait dengan Pembangunan Zona Integritas 5. Pelaksanaan ISO SMAP 37001:2016 harus menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang
2	Inkonsistensi dalam proses penilaian usulan antar verifikator	Mengurangi dampak terjadinya Risiko	1. Pembekalan terhadap verifikator 2. Perbaikan tata cara penilaian	Seluruh Kepala Bidang di lingkungan PFID	1. Sosialisasi pembekalan terhadap verifikator 2. Mekanisme dan indikator penilaian	1. November 2. November	1. - 2. -	1. Belum masuk tahapan proses penilaian usulan 2. Pada tematik PKKT telah dilakukan pembahasan tata cara penilaian	1. Belum terlaksana 2. Waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas serta pada tahun 2024 terdapat perubahan timeline perencanaan DAK tahun 2025 sehingga menyebabkan waktu perencanaan menjadi lebih singkat
3	Terjadi keterlambatan pada saat penyusunan bahan evaluasi	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	1. Mempercepat proses integrasi data emonitoring DAK dengan ONSPAN 2. Mengingatkan Pemerintah Daerah untuk update data progres melalui emonitoring DAK setiap bulan	Seluruh Kepala Bidang di lingkungan PFID	1. Data emonitoring DAK dengan ONSPAN telah terintegrasi 2. Data emonitoring DAK terupdate	1. November 2. November	1. Triwulan II 2. Triwulan II	1. Aplikasi emonitoring DAK dalam masa perbaikan dampak dari serangan Ransomware membuat aplikasi tidak dapat diakses sehingga Pemda tidak dapat melakukan input data progres, hal tersebut berdampak pada data emonitoring yang tidak dapat terupdate dan menyusahkan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Raker DAK yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2024 menjadi terhambat. Hal lain yang menjadi kendala yaitu proses pembuatan API untuk menyediakan data emon DAK kepada Bappenas terhambat dan penyimpanan data pada aplikasi emonitoring DAK masih terbatas.	1. Proses integrasi belum dapat dilakukan 2. Akibat terjadinya serangan Ransomware membuat aplikasi tidak dapat diakses sehingga Pemda tidak dapat melakukan input data progres, hal tersebut berdampak pada data emonitoring yang tidak dapat terupdate dan menyusahkan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Raker DAK yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2024 menjadi terhambat. Hal lain yang menyebabkan waktu serta pembuatan API untuk menyediakan data emon DAK kepada Bappenas terhambat dan penyimpanan data pada aplikasi emonitoring DAK masih terbatas.
4	Terjadi kolusi atau gratifikasi pada saat monitoring dan evaluasi untuk menutupi kualitas pekerjaan yang kurang baik	Mengurangi dampak terjadinya Risiko	1. Mengadakan kegiatan sosialisasi core value BerAkhlak/anti suap/gratifikasi kepada pegawai 2. Memasang banner anti suap/gratifikasi 3. Membuat tayangan berupa video di unit kerja tentang anti suap/gratifikasi	Seluruh Kepala Bidang di lingkungan PFID	1. Sertifikat/bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi core value BerAkhlak/anti suap/gratifikasi kepada pegawai 2. Banner anti suap/gratifikasi dan 4 Big No's 3. Tayangan tentang anti suap/gratifikasi	1. November 2. November 3. November	1. Triwulan II 2. Triwulan II 3. Triwulan II	1. Tidak ada hambatan/sudah terlaksana 2. Tidak ada hambatan/sudah terlaksana 3. Tidak ada hambatan/sudah terlaksana	1. PFID melaksanakan kegiatan Workshop Bribery Risk Assessment kepada pegawai pada tanggal 11 s.d 12 Juni 2024 di Bekasi sesuai dengan Surat Undangan Nomor UN/0102-Sf/166 2. Pemasangan banner anti suap/gratifikasi di lingkungan PFID, baik diprint masuk maupun di ruangan rapat 3. PFID sudah memiliki tayangan terkait dengan anti suap/gratifikasi

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator (keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambaran/Kendala	
									9	10
1	5 Adanya ancaman serangan terhadap aplikasi dari pihak eksternal	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	1. Peningkatan sistem proteksi kemungkinan dan dampak terjadinya pelatihan/bimtek	Seluruh Kepala Bidang di lingkungan PFIID	1. Sistem terproteksi dan operator mampu mengatasi ancaman serangan dari pihak luar 2. Sertifikat/bukti pelatihan serta operator mampu mengatasi permasalahan terkait ancaman serangan dari pihak luar	1. November 2. November	1. Triwulan II 2. -	1. Terjadi serangan Ransomware pada tanggal 20 Juni 2024 sehingga menyebabkan aplikasi emonitoring DAK tidak dapat diakses, kemudian proses recovery dilakukan pada tanggal 26 s.d 27 Juni 2024 dengan menggunakan data backup yang telah dimiliki menggunakan server PDNS1 yang bersifat sementara. Saat ini sedang dilakukan pentest guna mengetahui celah keamanan aplikasi emonitoring DAK 2. Belum tersedia pelatihan terkait programmer	1. Akses perbaikan aplikasi emonitoring DAK hanya bisa dilakukan di Pusdatin serta VPN yang digunakan untuk mengakses server hanya dapat digunakan di Pusdatin diselenggarakan sehingga pegawai melakukan secara mandiri melalui fasilitas video di youtube	1. Belum ada pelatihan terkait kompetensi programer yang dilakukan
6	6 Pemerintah Daerah belum melaksanakan kegiatan yang mendukung SPM PUPR	Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko	Penyusunan laporan SPM berbasis aplikasi yang telah terintegrasi dengan aplikasi internal dan termasuk dalam mekanisme pelaporan satu data cipta karya	Kepala Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman	Data SPM di aplikasi Sicalmers	1. November	1. Triwulan I 2. Triwulan I 3. Triwulan I	1. Sosialisasi terkait Permen SPM Nomor 13 Tahun 2023 sesuai Surat Undangan Nomor UMD/0102-Sf/60 tanggal 12 Februari 2024 2. Telah dilakukan penilaian terhadap hasil sosialisasi (pretest dan posttest) 3. Telah dilakukan rekrutmen konsultan individual untuk pelaporan SPM berbasis aplikasi	1. Sosialisasi dilakukan secara hybrid sehingga terdapat perbedaan waktu pada saat sosialisasi (Barat, Tengah dan Timur) 2. Terdapat peserta yang tidak mengisi pretest dan posttest 3. Pelamar rekrutmen sedikit	1. Sosialisasi dilakukan secara hybrid sehingga terdapat perbedaan waktu pada saat sosialisasi (Barat, Tengah dan Timur) 2. Terdapat peserta yang tidak mengisi pretest dan posttest 3. Pelamar rekrutmen sedikit
7	7 Pertanggungjawaban dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan tidak lengkap/ tidak sesuai aturan yang berlaku	Mengurangi dampak terjadinya Risiko	1. Penyusunan checklist dokumen administrasi 2. Mengadakan rapat rutin bulanan 3. Penataan arsip yang baik	Seluruh Kepala Bidang di lingkungan PFIID	1. Daftar checklist dokumen administrasi dan dokumentasi yang lengkap dan sesuai aturan yang berlaku 2. Notulenis dan dokumentasi rapat rutin bulanan 3. Daftar Arsip	1. November 2. November 3. November	1. Triwulan II 2. - 3. -	1. Telah dilakukan checklist dokumen kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan 2. Rapat rutin triwulan II belum terselenggara 3. Proses penataan arsip telah dilakukan yaitu dengan melakukan scan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam bentuk dokumen digital. Selain itu melakukan pengelompokkan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan.	1. Tidak ada hambaran/sudah dilakukan 2. Pelaksanaan rapat rutin yang seharusnya dilaksanakan setiap bulan belum dapat dilakukan karena masing-masing bidang telah melaksanakan kegiatan yang sudah terjadwal 3. Tidak ada hambaran/sudah dilakukan	Jakarta, 10 Juli 2024

Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah

Krisno Yuwono, S.T., M.T.
NIP. 197007111998031004

TINJAUAN ATAS RISIKO BARU ATAU MASALAH YANG BELUM TERIDENTIFIKASI
Unit Pemilik Risiko : Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah
Tahun : 2024
Periode : Triwulan II

No	Nama Kejadian	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Risiko	Level Risiko	Respon Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Belum ditemukan risiko baru

Jakarta, 10 Juli 2024
Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah,

Krisno Yuwono, S.T., M.T.
NIP. 197007111998031004

DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah

Tahun : 2024

Periode : Triwulan II

: Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah

: 2024

: Triwulan II

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun	Risiko yang Direspon	Besaran Risiko	Frekuensi	Level Risiko Aktual	Dampak	Besaran Risiko	Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terjadi kolusi atau gratifikasi dalam persetujuan rencana kegiatan yang diausulkan Pemerintah Daerah	0	3	2	8	2	2	7	1	Mayoritas inovasi sudah dijalankan dengan baik, meskipun terdapat inovasi pengendalian yang membutuhkan waktu
2	Inkonsistensi dalam proses penilaian usulan antar verifikator	0	3	2	8	3	2	8	0	-
3	Terjadi keterlambatan pada saat penyusunan bahan evaluasi	0	3	2	8	2	2	7	1	-
4	Terjadi kolusi atau gratifikasi pada saat monitoring dan evaluasi untuk menutupi kualitas pekerjaan yang kurang baik	0	3	2	8	2	2	7	1	Inovasi telah dijalankan dengan baik, diharapkan konsisten guna mendukung nilai risiko yang telah didapatkan
5	Adanya ancaman serangan terhadap aplikasi dari pihak eksternal	1	2	3	10	3	4	17	-7	1. Peningkatan proteksi server collocation 2. Peningkatan proteksi aplikasi monitoring DAK 3. Peningkatan frekuensi backup aplikasi dan database di server
6	Pemerintah Daerah belum melaksanakan kegiatan yang mendukung SPM PUPR	0	3	1	4	2	1	2	2	-
7	Pertanggungjawaban dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan tidak lengkap/ tidak sesuai aturan yang berlaku	0	2	2	7	2	1	2	5	Pengawasan terhadap pertanggungjawaban dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan harus senantiasa dilakukan

Jakarta, 10 Juli 2024

Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah,

Krisno Yuwono, S.T., M.T.
NIP. 197007111998031004

PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN

: Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan

: 2024

: II

Unit Pemilik Risiko

Tahun
Triwulan

No	Pemetaan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan/ Kendala
1	Kurang tepatnya waktu tindak lanjut pemantauan pelaksanaan kebijakan (Disposisi) Menteri PUPR	Mengurangi frekuensi terjadinya Risiko	Pelaksanaan Forum Komunikasi bersama PIC Unit Organisasi untuk tindak lanjut pemantauan pelaksanaan kebijakan (Disposisi) Menteri PUPR	Bidang Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan	1. Notulensi/Nota Dinas laporan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi bersama PIC Unit Organisasi 2. Data mengenai waktu tindak lanjut pemantauan pelaksanaan kebijakan (Disposisi) Menteri PUPR yang <14 hari	November	Masih dalam proses	1. Konsep SK PIC Unit Organisasi dalam proses verifikasi Biro Hukum 2. Rapat koordinasi kegiatan forum komunikasi bersama PIC Unit Organisasi telah dilaksanakan pada bulan Mei 2024	-
2	Kurang tepatnya waktu tindak lanjut pelaksanaan kebijakan	Mengurangi frekuensi terjadinya Risiko	Pengajuan rekomendasi pelaksanaan kebijakan yang lebih cepat/lebih awal	Bidang Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen Policy Brief dan Policy Memo	November	Masih dalam proses	1. Telah tersusun 5 Policy Brief dan 3 Policy Memo sampai dengan bulan Juni 2024 2. 2 Policy Brief dan 2 Policy Memo telah ril dalam periode tersebut	-
3	Tidak terlaksananya pelaksanaan audiensi//kegiatan agenda prioritas lainnya Menteri PUPR dari hasil arahan/disposisi Menteri PUPR	Mengurangi frekuensi terjadinya Risiko	Koordinasi dengan unit organisasi dan stakeholder terkait secara lebih intens	Bidang Dukungan Teknis Pimpinan	1. Daftar Agenda Prioritas Menteri 2. Arsip laporan kegiatan/undangan yang dihadiri Menteri	November	Masih dalam proses	1. Telah disusun rundown untuk tiap kegiatan kunjungan kerja Menteri PUPR baik di dalam negeri maupun luar negeri 2. Telah disusun rekapitulasi permojanan audiensi yang masuk dan yang telah didisposisi oleh Menteri PUPR 3. Telah dilakukan pengarsiran dokumentasi kegiatan Menteri PUPR untuk tiap minggunya	Terdapat kesulitan dalam pengalokasian waktu audiensi dengan agenda Menteri PUPR yang padat (kunjungan kerja, rapat, dll)
4	Standar Pelayanan Minimal (SPM) kurang terpenuhi	Mengurangi frekuensi terjadinya Risiko	Membuat Survey Online atau Barcode Kepuasan Layanan langsung untuk melihat hasil kepuasan Stakeholder setelah menerima hasil layanan	Bidang Dukungan Teknis Pimpinan	1. Daftar Responden 2. Hasil Survey	November	Masih dalam proses	Layanan administrasi persurat, layanan pengaturan iadwal/agenda harian, layanan penerimaan tamu, layanan pelaksanaan rapat, layanan pendampingan kegiatan/kunjungan dan layanan kerumahan/tanggaan berserta dukungan fasilitasi sartana prasaraa telah disesuaikan dengan SOP Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan	-

No	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung Jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambaran/ Kendala
1	2	3	4	5	Sub Bagian Tata Usaha	6	7	8	9
5	Tidak maksimalnya pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan urusan kepegawaian, keuangan, dan BMN	Mengurangi dampak terjadinya Risiko	1. Menyampaikan usulan formasi CPNS dan PPPK kepada BKD 2. Melakukan pengadaan pegawai outsourcing melalui pihak ketiga dan pengadaan langsung jasa perorangan (Konsultan individu)	1. Bukti Dokumentasi usulan Pengadaan Pegawai/PPPK 2. Surat Perintah Kerja (SPK) 3. Laporan Kerja Pegawai	Mei	Juni	1. Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan telah menyampaikan usulan Formasi CPNS dan PPPK pada bulan Januari 2024 melalui aplikasi SIASN, sebagai tindak lanjut surat Kepala Biro Kepedawaian Organisasi dan Tata Laksana Nomor KP.01/03-Sp/33 tentang usulan kebutuhan ASN dalam rangka pengadaan ASN Tahun 2024, untuk mengakomodir kebutuhan tambahan pegawai dalam menjalankan tusi keratausahaan Pusat 2. Pemenuhan kebutuhan pegawai melalui tenaga outsourcing telah terpenuhi 3. Telah dilakukan penyesuaian kriteria dan kualifikasi untuk usulan formasi CPNS dan PPPK 4. Terdapat 2 pegawai yang diusulkan untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang jasa (PBJ) yang diselenggarakan oleh BAPEKOM Yogyakarta pada bulan Juni 2024	1. Server pada aplikasi SIASN sempat mengalami gangguan sehingga mengganggu proses pengisian penyesuaian kriteria dan kualifikasi Formasi CPNS dan PPPK	10
6	Berkas pendukung pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak lengkap	Mengurangi frekuensi terjadinya Risiko	1. Mengusulkan pegawai (perabat dan pembantu pejabat kesatuan) untuk mengikuti pelatihan/diklat terkait perpendidaraan 2. Memastikan lembar kendali berjalan dengan baik	Sub Bagian Tata Usaha	1. Sertifikat pelatihan atau usulan untuk mengikuti pelatihan bagi pegawai yang bersangkutan 2. Berkas pendukung perjalanan dinas yang lengkap sesuai dengan ketentuan	November	Masih dalam proses	1. Terdapat satu pegawai yang telah selesai mengikuti pelatihan/diklat Bendahara Negara Terseftifikasi (BNT) dari Kementerian Keuangan pada bulan Maret 2024 2. Telah diusulkan satu pegawai untuk mengikuti pelatihan Refreshment PPK PPSPM Periode II Tahun 2024 Lingkup Unit Kerja Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta 3. Pengendalian terkait kelengkapan dokumen pendukung perjalanan dinas dan batas maksimal waktu pengumpulan (5 hari setelah perjalanan dinas) telah dilaksanakan menggunakan ceklist lembar kendali	-

Jakarta, 9 Juli 2024
Kepala Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan,



TINJAUAN ATAS RISIKO BARU ATAU MASALAH YANG BELUM TERIDENTIFIKASI

Unit Pemilik Risiko : Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan
Tahun : 2024
Triwulan : II

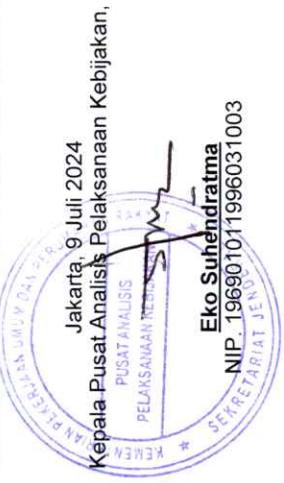
No	Nama Kejadian	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Risiko	Level Risiko	Respon Risiko
1	2 (belum ada risiko baru)	3	4	5	6	7	8	9
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-



DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO
 Unit Pemilik Risiko
 Tahun
 Triwulan

: Pusat Analisis Pelaksanaan Kebijakan
 : 2024
 : ii

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun			Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi
		Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko		
1	Kurang tepatnya waktu tindak lanjut pemantauan pelaksanaan kebijakan (Disposisi) Menteri PUPR	0	3	2	8	3	2	2	8	0	-	-
2	Kurang tepatnya waktu riil rekomendasi pelaksanaan kebijakan	0	2	2	7	2	2	2	7	0	-	-
3	Tidak terlaksananya pelaksanaan audensi/kegiatan agenda prioritas lainnya dan hasil arahan/disposisi Menteri PUPR	0	3	2	8	3	2	2	8	0	-	-
4	Standar Pelayanan Minimal (SPM) kurang terpenuhi	0	3	2	8	3	2	2	8	0	-	-
5	Tidak maksimalnya pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang berkait dengan urusan kepegawaian, keuangan, dan BMN	0	2	2	7	2	2	2	7	0	-	-
6	Berkas pendukung pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tidak lengkap	5	2	2	7	2	2	2	7	0	Melakukan pengawasan dan mengakses sejarah ketepatan waktu pengumpulan berkas pendukung pertanggungjawaban perjalanan dinas.	Eko Suhendratma



NIP. 196901011996031003



PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAPORAN

MANAJEMEN RISIKO

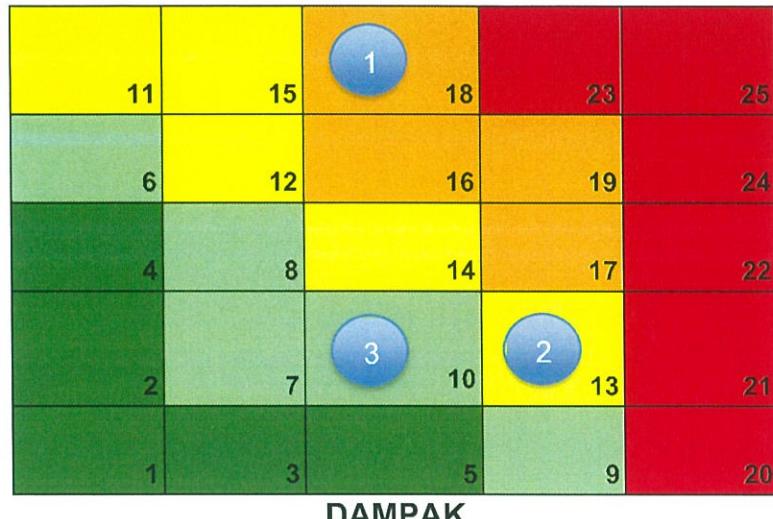
TRIWULAN II

SASARAN KEGIATAN PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

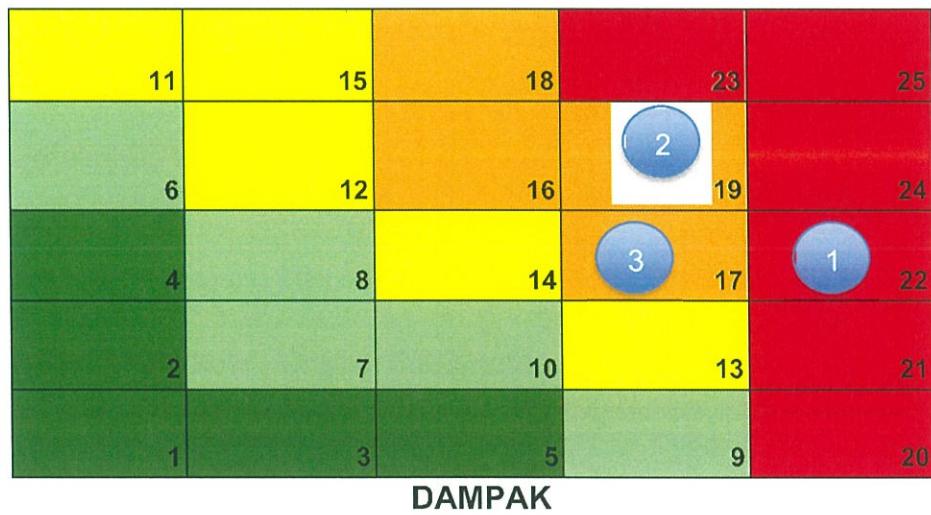
Tingkat	Nama Konteks (Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Output)	Indikator Sasaran	Kegiatan Utama ("") yang mendukung Capaian Indikator Strategis/Program/Kegiatan/Output	Tujuan Kegiatan Utama
			Terlaksananya Otomatisasi dan Digitalisasi Kegiatan Perkantoran	
		Otomatisasi dan Digitalisasi Kegiatan Perkantoran		
		Kemudahan dan Kenyamanan Bekerja		
		Layanan yang Akurat, Cepat, Terkini, Mudah Diakses, Terintegrasi, dan Berbagi Pakai		
		Layanan yang Terukur dan Terpantau (Akuntabilitas Kinerja)		
		Layanan Handal/Prima (Kemudahan dalam Pengajuan Permohonan Layanan, Proses Cepat, dan Layanan yang Diberikan sesuai Permohonan)		
	Sasaran Kegiatan : Digital Melayani UPR-T2	Penyediaan Teknologi Terkini dan Inovasi	Tersedianya Layanan yang Terukur dan Terpantau (Akuntabilitas Kinerja)	
		Penanggulangan dan Tanggap bencana serta analisis manajemen risiko bencana terintegrasi	Tersedianya Teknologi Terkini dan Inovasi	
		Pengembangan Sistem Informasi Tanggap Bencana PUPR	Tersedianya Pengembangan Sistem Informasi Tanggap Bencana PUPR	
	Manajemen Perubahan/Tata Kelola	Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu (Pranata Komputer, Surveyor Pemetaan, dan Statistik)	Terselenggaranya Pembinaan Jabatan Fungsional Tertentu (Pranata Komputer, Surveyor Pemetaan, dan Statistik)	
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Tingkat Layanan Kepegawaian, Keuangan, BMN dan Umum Satuan Kerja Pusdatin	Tersedianya tingkat Layanan Kepegawaian, Keuangan, BMN dan Umum Satuan Kerja Pusdatin	

PETA RISIKO

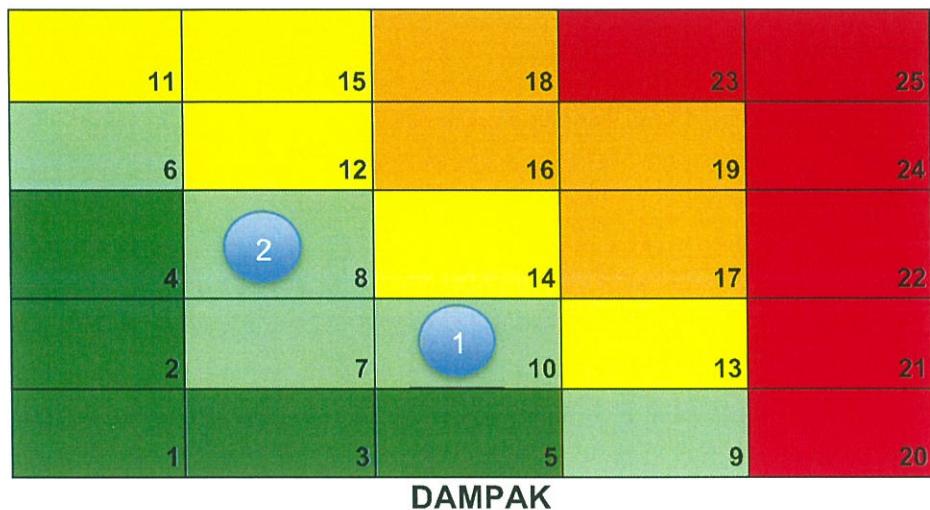
Sistem pengendalian jaringan internet dan data center



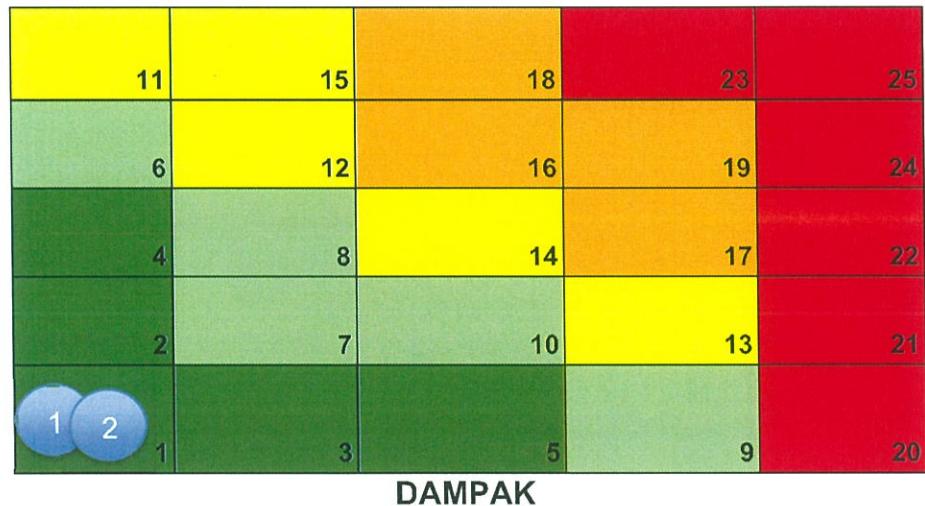
Keamanan Sistem dan Aplikasi mendapat serangan dari yang mencoba
mengakses aplikasi PUPR



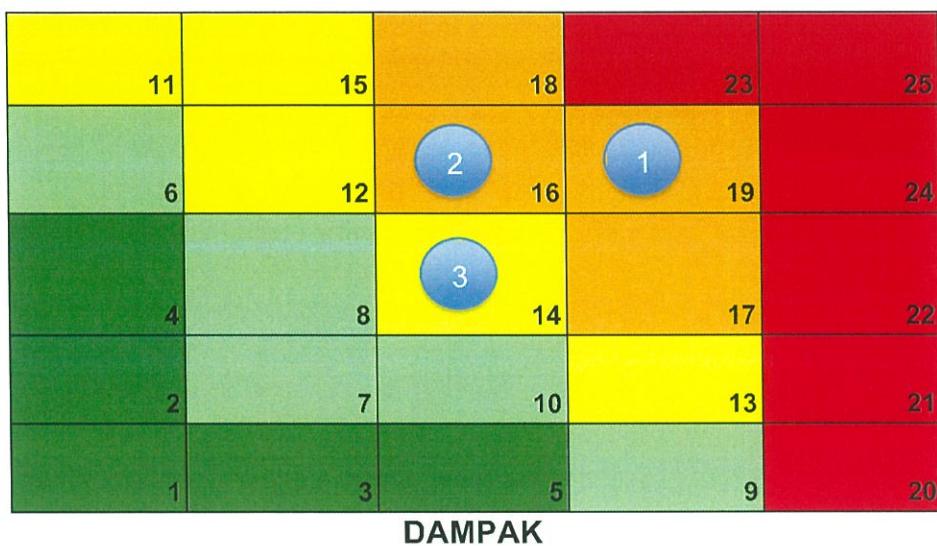
Pengelolaan aplikasi/sistem informasi belum terencana dan termonitoring dengan baik



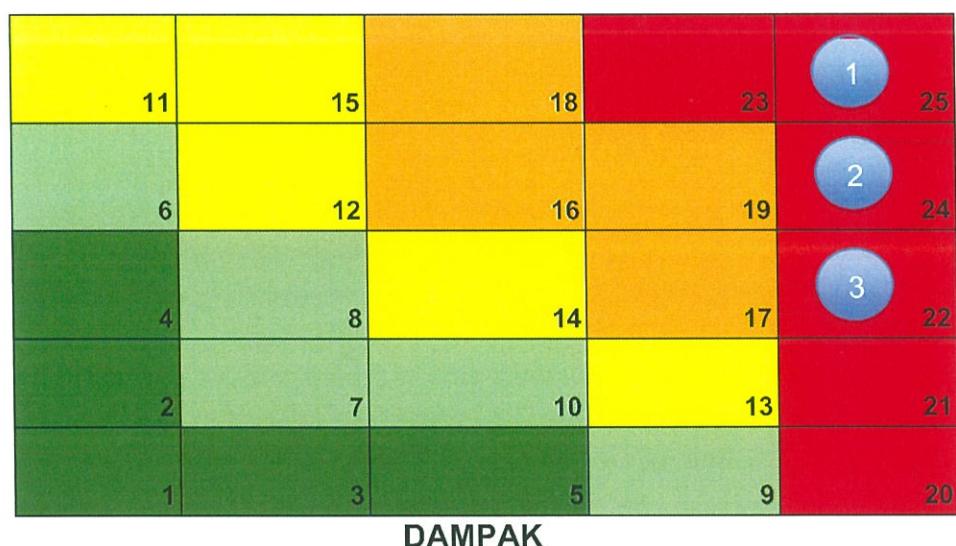
Pengelolaan data dan informasi PUPR belum memperhatikan Kualitas input data



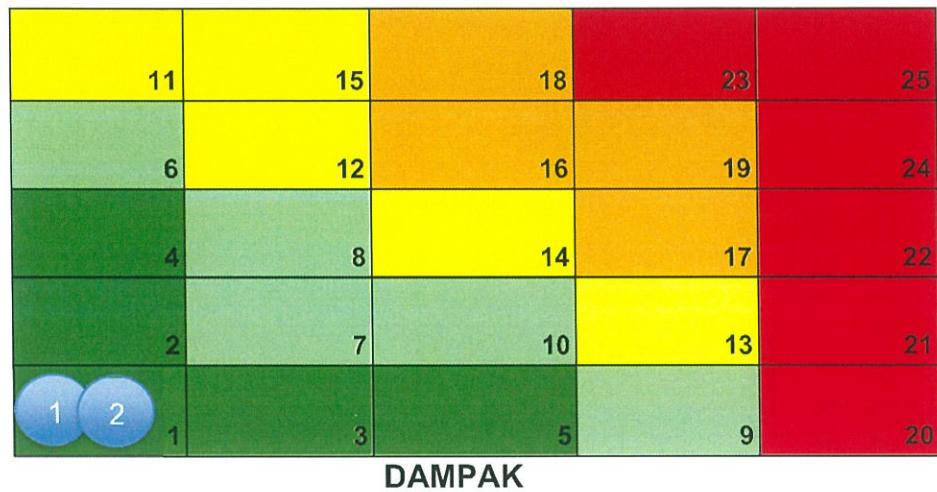
Belum optimalnya waktu penyelesaian Pengajuan Layanan



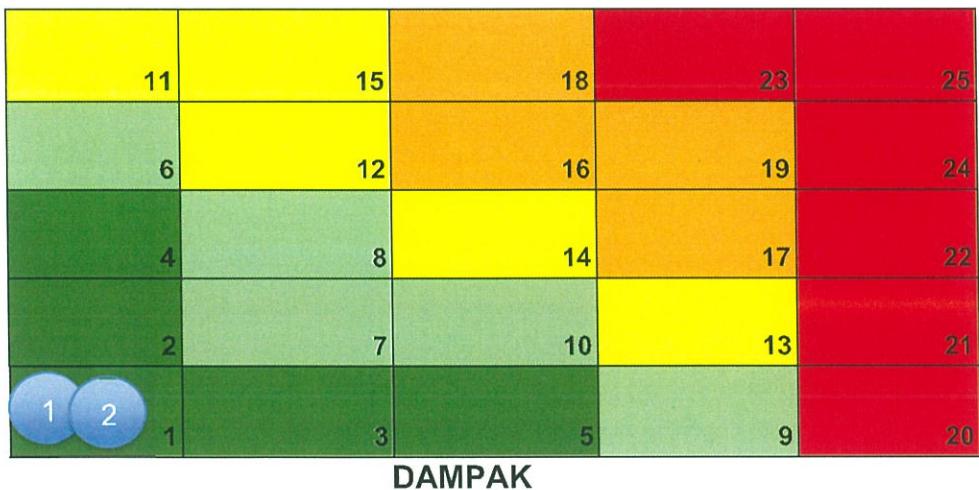
Perpindahan (Migrasi) antar platform perangkat kolaborasi digital dapat mengakibatkan kehilangan data



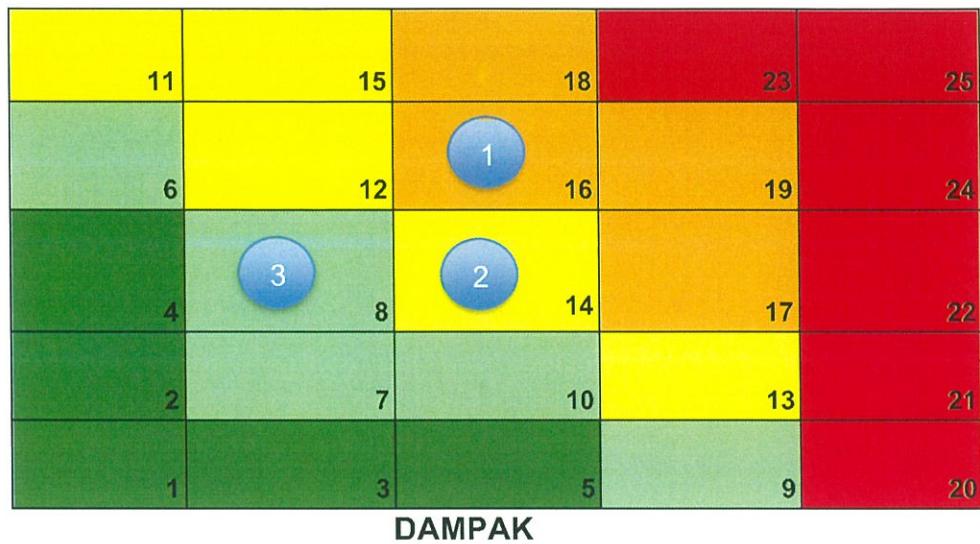
Pengelolaan pelaporan bencana belum terotomatisasi dan terdigitalisasi dengan baik



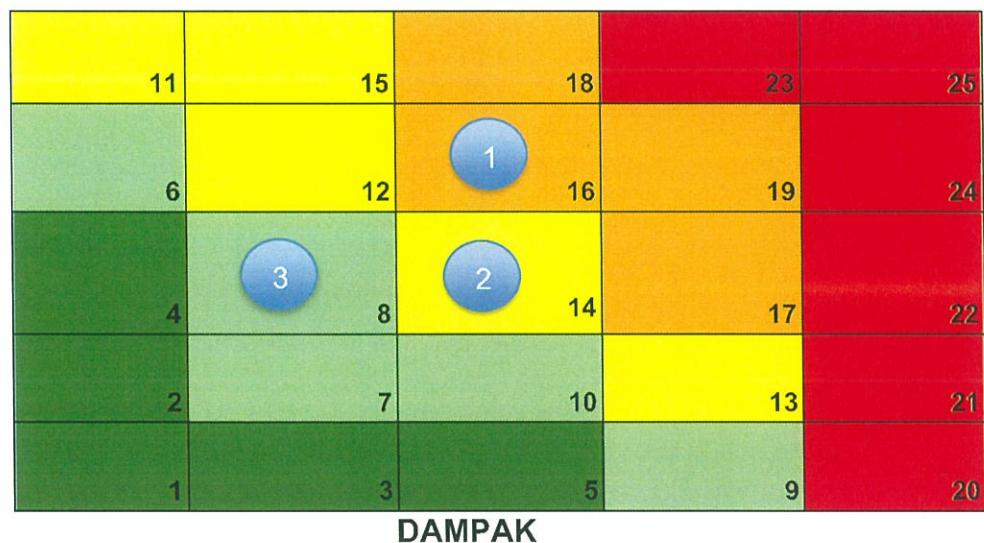
Perolehan data Kejadian dan Penanganan Bencana yang belum terintegrasi



Adanya keterlambatan informasi kepada pegawai terkait kejafungan



Adanya keterlambatan informasi terkait Layanan Kepegawaian Pusdatin



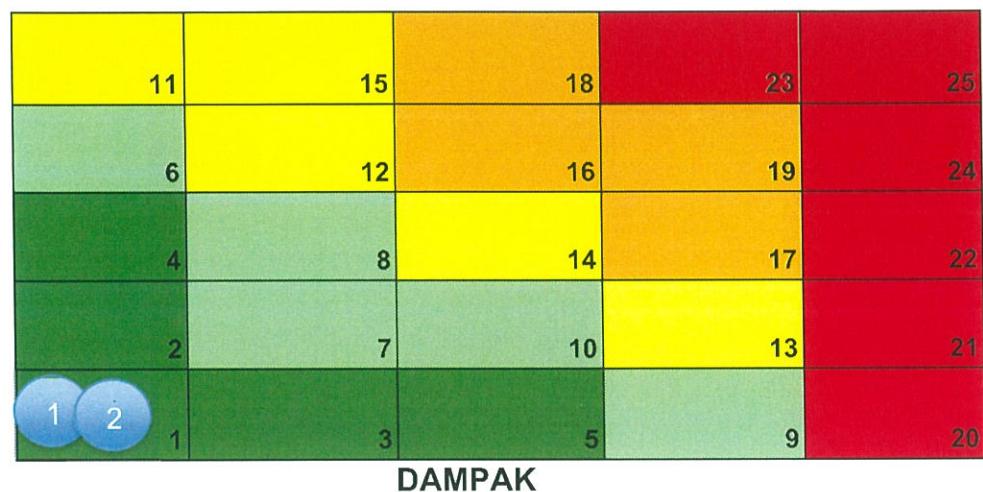
Kualitas Data Keuangan Rendah

11	15	18	23	25
6	12	16	19	24
4	8	14	17	22
1 2 2	7	10	13	21
1	3	5	9	20
DAMPAK				

Temuan pada Penatausahaan Aset BMN

11	15	18	23	25
6	12	16	19	24
4	8	14	17	22
2	7	10	13	21
1	3	5	9	20
DAMPAK				

Dokumen Pengadaan Barang/Jasa belum Sesuai dengan Peraturan yang berlaku



Keterangan:

- 1 : Risiko yang melekat
- 2 : Risiko setelah ada pengendalian
- 3 : Risiko yang diperoleh

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN MANAJEMEN RISIKO

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN												
No	Tahap Proses MR	Bulan										
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	November
1	Komunikasi Data dan Konsultasi	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
2	Komunikasi Manajemen Risiko	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2.a	Penetapan Konteks dan Lingkup	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
2.b	Identifikasi Risiko	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
2.c	Analisis Risiko	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
2.d	Evaluasi Risiko	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Inovasi Pengendalian	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
4	Pemantauan	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
5	Laporan Penerapan MR	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2

PEMANTAUAN INOVASI PENGENDALIAN

UNIT PEMILIK RISIKO
TAHUN
TRIWULAN

Pusat Data dan Teknologi Informasi

2024

2	Keamanan Sistem dan Aplikasi mendapat serangan dari yang mencoba mengakses aplikasi PUPR	Mengurangi frekuensi terjadinya risiko	1. Monitoring dan pemantauan keamanan sistem aplikasi	Bidang Manajemen Teknologi Informasi	1. Rekomendasi Hasil Penetration Test Aplikasi	Maret, Juni 2024	Triwulan	Tidak ada
			2. Sosialisasi keamanan sistem dan aplikasi	2. Laporan Sosialisasi keamanan sistem dan aplikasi	5 Juni 2024	Laporan Sosialisasi Keamanan Sistem dan Aplikasi	Triwulan	Tidak ada
3	Pengelolaan aplikasi/sistem informasi belum terencana dan termonitoring dengan baik	-	3. Pelatihan terkait keamanan sistem dan aplikasi	3. Sertifikat Pelatihan	Januari, Mei 2024	Sertifikat Pelatihan	Triwulan	Tidak ada
4	Pengelolaan data dan informasi PUPR belum memperhatikan kualitas input data	-	-	-	-	-	-	-
5	Belum optimalnya waktu penyelesaian pengajuan layanan	Mengurangi frekuensi terjadinya risiko	1. Penguatan kerjasama antar kelembagaan	Bidang Manajemen Teknologi Informasi dan Bidang Data	1. MoU PKS	November 2024	MoU PKS	Membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan untuk menunggu hasil

	dengan baik	-	-	-	-	-
8	Perolehan data kejadian dan penanganan bencana yang belum terintegrasi	-	-	-	-	-
9	a. Adanya keterlambatan informasi kepada daerah pegawai terkait kejufungannya	Mengurangi frekuensi terjadinya risiko	1. Reminder permantauan penyampaian informasi melalui blasting email Pusdatin	Bidang Tata Usaha	Triwulan	Kegiatan Triwulan II Pusdatin dilaksanakan tanggal 8-10 Juli 2024
	b. Kurangnya pemahaman pegawai terkait Konversi Penilaian kinerja jabatan fungsional (pranata komputer, survei pemerataan, dan statistisi)		2. Sosialisasi berkala terkait penilaian fungsional (pranata komputer, penetaan, statistisi)	Laporan Sosialisasi	Triwulan	Kegiatan Sosialisasi akan dilaksanakan pada pertengahan Juli 2024
10	Adanya keterlambatan informasi terkait Layanan Kepegawaian Pusdatin	Mengurangi frekuensi terjadinya risiko	Reminder Permantauan Penyampaian Informasi melalui Blasting Email Pusdatin	Bidang Tata Usaha	Triwulan	Kegiatan Triwulan II Pusdatin dilaksanakan tanggal 8-10 Juli 2024
11	Kualitas Data Keuangan Rendah	-	-	Laporan Sosialisasi	Februari 2024	Laporan Triwulan Tim Kepegawaian dan Jafung

-	-	-	-	-
12	Temuan pada Penatausahaan Aset BMN	-	-	-
13	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa belum Sesuai dengan Peraturan yang berlaku	-	-	-

Jakarta, 5 Juli 2024
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi



TINJAUAN ATAS RISIKO BARU ATAU MASALAH YANG BELUM TERIDENTIFIKASI

UNIT PEMILIK RISIKO : Pusat Data dan Teknologi Informasi
TAHUN : 2024
TRIWULAN : II

No	Nama Kejadian	Pernyataan Risiko	Penyebab Risiko	Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Risiko	Level Risiko	Respon Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengisian Data Bencana untuk Brief Notes Kebencanaan tidak <i>real time</i>	Pengelolaan pelaporan bencana belum terotomatisasi dan terdigitalisasi dengan baik	Unit pemilik data belum responsif dan komprehensif dalam melaporkan kejadian bencana	4	4	19	Tinggi	Mengurangi Dampak Risiko

Jakarta, 5 Juli 2024
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi



DAFTAR PEMANTAUAN LEVEL RISIKO

UNIT PEMILIK RISIKO
TAHUN
TRIWULAN

: Pusat Data dan Teknologi Informasi
 : 2024
 : II

No	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko 1 Tahun (Berapa Kali Terjadi)	Risiko Yang Direspon			Level Risiko Aktual			Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi (Tindak Lanjut Perbaikan)
			Frekuensi/ Tingkat Kemungkinan	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sistem pengendalian jaringan internet dan data center yang belum kompatibel	30	3	4	17	2	3	10	7	Melakukan monitoring jaringan internet berkala dan menyusun laporan monitoring jaringan internet
2	Keamanan Sistem dan Aplikasi mendapat serangan dari yang mencoba mengakses aplikasi PUPR	32	4	5	24	4	5	24	0	Penguatan keamanan tidak hanya dari sisi offensive security tetapi juga dari sisi defensive security (Lesson security)

								learned dari insiden ransomware PDNs)
3	Pengelolaan aplikasi/sistem informasi belum terencana dan termonitoring dengan baik	-	2	3	10	3	2	-
4	Pengelolaan data dan informasi PUPR belum memperhatikan kualitas input data	-	1	1	1	1	1	-
5	Belum optimalnya penyelesaian pengajuan layanan	3	4	4	19	4	3	-
6	Perpindahan (migrasi) antar perangkat kolaborasi digital dapat mengakibatkan kehilangan data	-	3	5	22	3	4	-
7	Pengelolaan pelaporan bencana belum terotomatisasi dan terdigitalisasi dengan baik	-	1	1	1	1	1	-

8	Perolehan kejadian penanganan yang terintegrasi	data dan bencana belum	-	1	1	1	1	1	1	0	-
9	a. Adanya lambatan masi kepada pegawai kejafungsan	keter-infor-masi kepada da terkait	-	4	3	16	3	3	14	2	-
	b. Kurangnya pema-haman pengawai terkait Konversi Penilaian kinerja jabatan fungsional (pranata kompu-ter, survey peme-taan, dan statistisi)										-
10	Adanya keterlambatan informasi terkait Layanan Kepegawaian Pusdatin	-	4	3	16	3	3	14	2	-	-
11	Kualitas Keuangan Rendah	Data pada Aset	-	2	1	2	2	1	2	0	-
12	Temuan Penatausahaan BMN		-	1	4	9	1	4	9	0	-

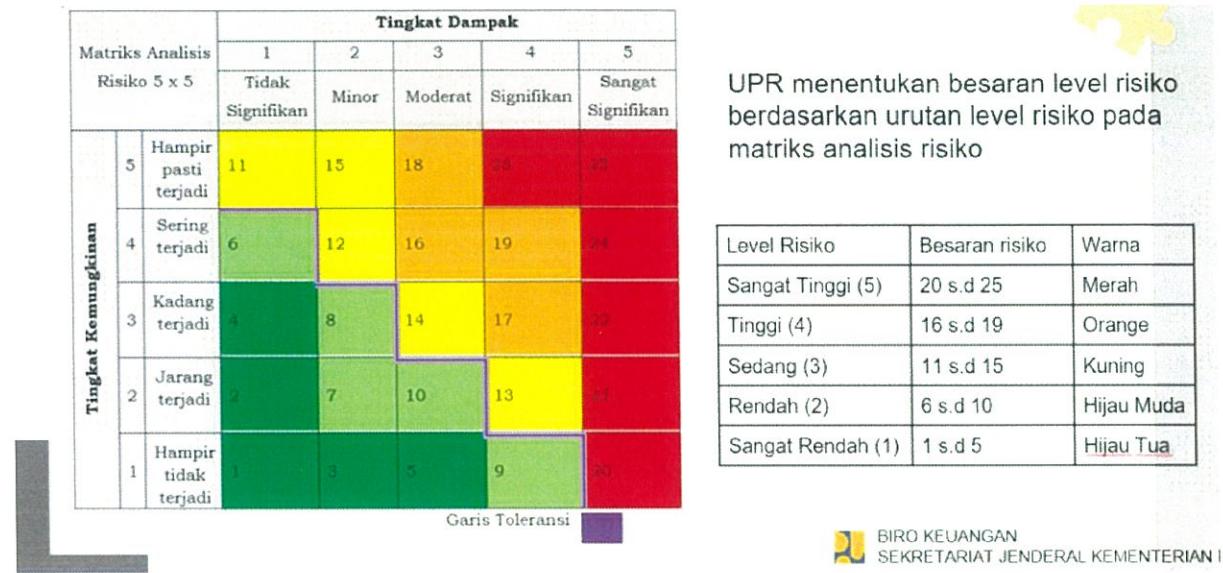
13	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Peraturan yang berlaku	-		1	1	1	1	0	-	-
----	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---

Jakarta, 5 Juli 2024
Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi



Penjelasan dan Contoh:

Pencantuman angka dalam kolom di Daftar Pemantauan Level Risiko, dengan menggunakan Matriks Analisa Risiko sebagai berikut :



2. Pernyataan Risiko : Sistem pengendalian jaringan internet dan data center yang belum kompatibel

Kejadian dalam 1 tahun : 30 kali

Risiko yang direspon				Level Risiko Aktual			
Frequensi	Dampak	Besaran Risiko	Warna	Frequensi	Dampak	Besaran Risiko	Warna
3	4	17	Orange	2	3	10	Green
Pada Pernyataan Risiko dengan frekuensi kadang terjadi, akan memberikan dampak yang signifikan maka Risiko yang direspon menunjukkan level risiko tinggi (17)				Pada pernyataan risiko dengan frekuensi jarang terjadi, akan memberikan dampak yang moderat maka Level Risiko Aktual menunjukkan level risiko rendah (2)			

3. Pernyataan Risiko : Keamanan Sistem dan Aplikasi mendapat serangan dari yang mencoba mengakses aplikasi PUPR

Kejadian dalam 1 tahun : 32 kali

Risiko yang direspon				Level Risiko Aktual			
Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Warna	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Warna
4	5	24	Red	4	5	24	Red
Pada pernyataan risiko dengan frekuensi sering terjadi, akan memberikan dampak sangat signifikan maka Risiko yang direspon menunjukkan level risiko sangat tinggi (24)				Pada pernyataan risiko dengan frekuensi sering terjadi, akan memberikan dampak sangat signifikan maka Risiko yang direspon menunjukkan level risiko sangat tinggi (24)			

4. Pernyataan Risiko : Belum optimalnya waktu penyelesaian pengajuan layanan
 Kejadian dalam 1 tahun : 3 Kali

Risiko yang direspon				Level Risiko Aktual			
Frequensi	Dampak	Besaran Risiko	Warna	Frequensi	Dampak	Besaran Risiko	Warna
4	4	19		4	3	16	
Pada pernyataan risiko dengan frekuensi sering terjadi, akan memberikan dampak yang tidak signifikan maka Risiko yang direspon menunjukkan Level Risiko tinggi (4)				Pada pernyataan risiko dengan frekuensi sering terjadi, akan memberikan dampak yang moderat maka Level Risiko Aktual menunjukkan level risiko tinggi (4)			

Jakarta, 5 Juli 2024
 Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi



LOSS EVEN DATA BASE (LED)

Unit Pemilik Erisiko : Pusat Data dan Teknologi Informasi
Tahun : 2024

No	Tanggal Pendataan	Uraian Peristiwa	Waktu Terjadi	Lokasi	Sebab	Dampak	Rincian Penangganan	Kondisi Setelah
1	2 Januari 2024	Terdapat temuan kabel LAN di lantai 13 yang terindikasi kabel digigitikus dan rusak; Untuk WiFi setelah pengecekan ada beberapa PC support dan tidak support yang mengakibatkan speedtest lambat;	3 Januari 2024	Lantai 13 Gedung Utama	Kabel LAN yang digigitikus	Jaringan Internet pada saat zoom menjadi tidak optimal	Tim Pusdatin melakukan perbaikan switch hub dari 10/100mbps menjadi 1000mbps (3 Unit); Tim Pusdatin memastikan semua PC/laptop dapat terhubung internet dengan baik dan cepat.	Belum ditemukan kejadian serupa
2	2 Januari 2024	Terdapat juga hub 6 port 10/100 yang mengakibatkan jaringan internet yang tidak optimal; Zoom sering putus putus di beberapa laptop dan PC yang spesifikasi nya masih rendah.	4 Januari 2024	Lantai 13 Gedung Utama	RJ 45 rusak yang menyebabkan speedtest melambat	Zoom sering putus putus di beberapa laptop dan PC yang spesifikasi nya masih rendah	Tim Pusdatin melakukan perbaikan RJ45 pada Kabel Lan	Belum ditemukan kejadian serupa
3	3 Januari 2024	Terdapat temuan kabel LAN di lantai 13 yang terindikasi RJ45 rusak yang mengakibatkan speedtest melambat	10 Januari 2024	Kampus PUPR	Kabel Fiber Optik yang Cut Off	Gangguan Internet pada Jaringan Intra Pemerintah	Dilakukan penggecekan oleh tim dan penyambungan kabel kembali	Belum ditemukan kejadian serupa

4	Januari 2024	Tidak bisa edit Network Interface Card (NIC) vaps Setien-2	10 Januari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Gangguan pada perangkat Network Interface Card (NIC)	Dilakukan penggecekan oleh tim dan penyambungan kabel kembali	Belum ditemukan kejadian serupa
5	Januari 2024	Tidak bisa create server Network Interface Card (NIC) vaps Setien-3	10 Januari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Gangguan pada perangkat Network Interface Card (NIC)	Dilakukan penggecekan oleh tim dan penyambungan kabel kembali	Belum ditemukan kejadian serupa
6	Januari 2024	Tidak bisa mengedit Network Interface Card (NIC) Virtual Machine 2022 pada Poli Klinik 240.74	10 Januari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Gangguan pada perangkat Network Interface Card (NIC)	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
7	Januari 2024	Layanan Jaringan Infra Pemerintah (IP) PUPR-PDNs tidak terkoneksi	10 Januari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses jaringan infra Pemerintah (JIP)	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
8	Januari 2024	Tidak dapat add Virtual Disk 50 Sebesar 50 TB di Virtual Machine data biring Data dan Informasi tahun 2024 dihvs-Siki	11 Januari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Gagal memuat data	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
9	Januari 2024	Tidak bisa power on server baru create server baru part 2	12 Januari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
10	Januari 2024	Tidak bisa power on server milik balai BPSPM	12 Januari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
11	Januari 2024	Tidak bisa power on server 2024-Bakcup-SubdIKL	18 Januari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
12	Januari 2024	Tidak bisa power on server KJPI modul marketing	19 Januari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
13	Januari 2024	Tidak bisa power on server 2024-Sitaba	22 Januari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
14	Januari 2024	Tidak bisa power on Virtual Machine 2024-JAKI	22 Januari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
15	Januari 2024	Tidak bisa power on template Ubuntu 22.02	23 Januari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
16	Januari 2024	Tidak bisa power on Virtual Machine 2024-rahm-app	30 Januari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
17	Januari 2024	Tidak bisa power on Virtual Machine 2024 (chatbot)	31 Januari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
18	Januari 2024	Tidak bisa power on Virtual Machine 2024 (irmsv3)	1 Februari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
19	Februari 2024	Tidak bisa power on Virtual Machine 2024 (irmsv3)	1 Februari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
20	Februari 2024	Tidak bisa power on Virtual Machine 2024 (chatbot-MI)	1 Februari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
21	Februari 2024	Tidak bisa delete member pool IP 10.30.20.108	2 Februari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Gagal delete member pool	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
22	Februari 2024	Health Virtual Service Ijen terpantau Down	2 Februari 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Health Virtual	Dilakukan penggecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa

23	Februari 2024	pemeriksaan dan perbaikan jaringan internet yang mengalami down pada pukul 08.53 WIB di Kementerian PUPR	19 Februari 2024	Kampus PUPR	Internet Down	Jaringan Internet 1 kampus PUPR mengalami down	Dilakukan pemeriksaan dan perbaikan oleh tim laringan Teknologi Informasi	Belum ditemukan kejadian serupa
24	Maret 2024	Tidak bisa edit Network Interface Card (NIC) server 2023 (Webperumahan)	4 Maret 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Gangguan pada perangkat Network Interface Card (NIC)	Dilakukan pengecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
25	Maret 2024	Tidak bisa power on server 2024 (SPSE-APP)	15 Maret 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan pengecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
26	Maret 2024	Tidak bisa power on server 2024 (SPSE-DB)	15 Maret 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan pengecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
27	Maret 2024	Virtual Disk tidak terdeteksi untuk booting Virtual Machine 2024 (SPSE-APP & DB)	19 Maret 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mendeteksi booting VM	Dilakukan pengecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
28	Mei 2024	url https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/tidak dapat diakses	13 Mei 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan pengecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
		Akses ke https://espm.bpiit.pu.go.id/mutter-mutter.safir.jaringan dari server apakah gangguan? karena ini dari jaringan sedang juga lambat. Sekali	13 Mei 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan pengecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
29	Mei 2024	Aplikasi digital map yang di digitalmap.pu.go.id tidak bisa diakses	15 Mei 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan pengecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa
30	Jun 2024	Tidak bisa akses ke server/websit Kementerian PUPR	20 Juni 2024	Kampus PUPR	Gangguan gagal akses dari PDN kominfo	Tidak bisa mengakses server yang dituju	Dilakukan pengecekan oleh tim PDN Kominfo	Belum ditemukan kejadian serupa

INSIDEN PERETASAN

No.	Tanggal Insiden	Unor	Unker	Jenis Serangan	Url Terdampak	IP	Status
1	27/01/2024	Ditjen Sumber Daya Air	Sekretariat Ditjen SDA	Defacement	http://epaksi.sda.pu.go.id/gacorbet.html	103.211.51.198	Sedang dilakukan isolasi aplikasi
2	27/01/2024	Ditjen Bina Marga	Sekretaris Ditjen BM	Defacement	https://binamarga.pu.go.id/jurnal/gacor/	103.8.238.217	Selesai
3	27/01/2024	BPJT	Sekretaris BPJT	Defacement	https://konsesiijasa.bjpt.pu.go.id/assetbpl/uploads/gacor/?tunnel=rahabandot	103.211.51.43	Selesai
4	31/01/2024	Ditjen Cipta Karya	Sekretaris Ditjen Cipta Karya	Defacement	https://simbg.pu.go.id	103.6.34.25	Selesai
5	07/02/2024	Ditjen Bina Marga	Sekretaris Ditjen Bina Marga	Defacement	http://jurnal.pusdatin.pu.go.id/files/-/slot-terbaik/	202.51.235.169	Selesai
6	11/02/2024	Sekretariat Jenderal	Pusdatin	Defacement	https://isqi.pu.go.id/astiv2/is/7link=naza508 https://isqi.pu.go.id/astiv2/is/7link=qdcashh88 https://isqi.pu.go.id/astiv2/is/7link=aksara4d https://isqi.pu.go.id/astiv2/is/7link=Padangtoto https://isqi.pu.go.id/astiv2/is/7link=antit69 https://isqi.pu.go.id/astiv2/is/7link=casapizze https://isqi.pu.go.id/astiv2/is/7link=sportolo https://isqi.pu.go.id/astiv2/is/7link=sakauto https://isqi.pu.go.id/astiv2/is/7link=igadewa https://isqi.pu.go.id/astiv2/is/7link=indonesia4d https://isqi.pu.go.id/astiv2/is/7link=toto%20oire https://isqi.pu.go.id/astiv2/is/7link=kobiet4d https://isqi.pu.go.id/astiv2/is/7link=bro138 https://siai.pu.go.id/astiv2/is/7link=tola4d https://siai.pu.go.id/astiv2/is/7link=sinat777 https://siai.pu.go.id/kitsbang/login.php https://siai.pu.go.id/sisdo_dev/login.php	34.96.91.162	Selesai
7	23/02/2024	Sekretariat Jenderal	Pusdatin	Defacement	https://sige.pu.go.id/astiv2/is/7link=g11bc1	34.96.91.162	Selesai
8	12/02/2024	Ditjen Cipta Karya	Direktorat Air Minum	Defacement	https://simpamsmas.pu.go.id/api/kasus/manakan	34.96.91.162	Sedang dilakukan isolasi aplikasi
9	23/02/2024	Ditjen Cipta Karya	Direktorat Air Minum	Defacement	https://simpanan.pu.go.id/client-e-pengalaman/uploads/file_dokumen_bu_subkon/slot/	10.30.22.143	Selesai
10	18/02/2024	Ditjen Bina Konstruksi	LPJK	Defacement			
11	23/02/2024	Ditjen Bina Marga		Defacement	https://okspip.pu.go.id/apps/attachments/gacor-4d/	10.30.16.138	Selesai
12	27/02/2024	Ditjen Cipta Karya	Dit. SSIP	Defacement	https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa/dokumen/	103.211.50.135	Selesai
13	04/03/2024	Ditjen Cipta Karya	Dit. SSIP	Defacement	https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa/dokumen/	103.211.50.135	Selesai
14	14/03/2024	Ditjen Cipta Karya	Dit. SSIP	Defacement	https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa/file_peneritian/	103.211.50.135	Selesai

15	20/03/2024	Sekretariat Jenderal	Biro Kepergawaiuan dan Ortala	Defacement https://chrm.pu.go.id/pupr/assets/ckeditor/plugins/about/dialogs/ https://chrm.pu.go.id/dialogs/	34.117.2.158	Sellesai
16	25/03/2024	Ditjen Perumahan		Defacement https://datarlh.perumahan.pu.go.id/2020/dklat/tmp/toto/	34.149.103.26	Sellesai
17	25/03/2024	Sekretariat Jenderal	Biro Umum	Illegal Access https://eoffice.pu.go.id/	34.117.249.119	Sellesai
18	26/03/2024	BPIW		Defacement https://p3tb.pu.go.id/assets/spulse/	103.211.50.196	Sedang dilakukan isolasi aplikasi
19	30/03/2024	Ditjen Sumber Daya Air		Defacement https://pendidangan.kita.sda.pu.go.id/assets/css/demo/		Sedang dilakukan isolasi aplikasi
20	30/03/2024	Ditjen Sumber Daya Air		Defacement https://epaksi.sda.pu.go.id/fonts/?sda=gacor-togel	10.30.14.123	Sedang dilakukan isolasi aplikasi
21	03/04/2024	Ditjen Bina Marga		Defacement https://binamarga.pu.go.id/balai-gts/assets/online/	103.8.238.217	Sellesai
22	03/04/2024	Sekretariat Jenderal	Pusdatin	Defacement https://bank-data.bpiw.pu.go.id/assets/html/	App Store	Sedang Perbaikan
23	06/04/2024	BPIW	Sekretariat BPIW	Defacement https://ciptakarya.pu.go.id/		Sellesai
24	24/04/2024	Ditjen Cipta Karya		Defacement https://sipdin.binamarga.pu.go.id/assets		Sedang Perbaikan
25	27/05/2024	Ditjen Bina Marga	Dit. Bina Teknik	Defacement https://sipdin.binamarga.pu.go.id/img		Sellesai
26	28/05/2024	Ditjen Bina Marga	Dit. Bina Teknik	Defacement https://10.30.16.103	10.30.16.103	Sellesai
27	29/05/2024	Ditjen Perumahan		Defacement https://datarlh.perumahan.pu.go.id/2020/dklat	34.149.103.26	Sellesai
28	31/05/2024	Ditjen Bina Marga		Defacement https://renprogbms.binamarga.pu.go.id/assets/humanial/		Sellesai
29	06/06/2024	Sekretariat Jenderal	Pusdatin	Defacement https://data.pu.go.id/sites/default/files/sthai/s99/		Sedang Perbaikan
30	12/06/2024	Ditjen Perumahan		Defacement https://datarlh.perumahan.pu.go.id/importibps/upload/botai		Sedang Perbaikan
31	19/06/2024	Ditjen Bina Marga		Defacement https://sipdin.binamarga.pu.go.id/botai		Sedang Perbaikan
32	21/06/2024	Ditjen Sumber Daya Air		Defacement https://skimrt.sda.pu.go.id/	https://skimrt.sda.pu.go.id/template/?kanji=rap123%20log	Sedang Perbaikan